



MINGGU II MARET 2024

● TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 ●

info indonesia

HARGA @ Rp 20.000,-

GOLKAR UNTUK JOKOWI ATAU GIBRAN?

- ▶ **PRABOWO MAU UBAH SISTEM DEMOKRASI**
- ▶ **HASIL PILPRES TIDAK BERPENGARUH DI PILKADA**
- ▶ **HERMAN DERU DAN MAWARDI YAHYA BERPISAH**
- ▶ **GOLKAR INCAR KURSI KETUA DPR**
- ▶ **NASDEM TANTANG KESERiusAN PDIP**
- ▶ **SIREKAP BUKA PRAKTIK KECURANGAN PERHITUNGAN**
- ▶ **SUARA GANJAR-MAHFUD DIKUNCI 17%**
- ▶ **PENANTANG MAKIN POPULER PETAHANA TUMBANG**



Election
2024



“Miris mendengar isu begini. Apakah Golkar akan serendah itu mau menyerahkan kursi ketua pada yang bukan kadernya? Apakah itu bukan seperti penghinaan pada Golkar?”

Saidiman Ahmad



Beringin

Dinamika politik Tanah Air usai pesta demokrasi 14 Februari 2024 masih terus digoyang dengan beragam pemberitaan yang oleh Anies Baswedan disebut untuk pengalihan isu kecurangan Pemilu.

Anies diisukan bakal kembali maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun ini setelah diperkirakan gagal di Pilpres 2024 karena kalah dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Peluang Anies maju di Pilgub DKI, yang bakal berubah menjadi DKJ atau Daerah Khusus Jakarta, cukup besar lantaran dirinya memiliki basis pendukung di Jakarta. Apalagi, PKS sebagai pendukung utama Anies juga unggul dalam Pileg DPR di Jakarta.

Kabar lain yang memanaskan politik saat ini adalah isu Gibran Rakabuming Raka yang berpeluang menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Isu ini pertama kali dicetuskan oleh pengamat politik M Qodari.

Gibran sendiri sudah memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku tidak pantas, karena banyak tokoh senior yang berpengalaman.

Namun, kita semua tahu, seperti ayahnya, Joko Widodo, apa yang diucapkan Gibran bisa saja berkebalikan dengan yang terjadi di kemudian hari. Maka jangan kaget apabila orang nomor satu di Kota Solo itu tiba-tiba menjadi orang nomor satu di partai beringin.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, menilai Partai Golkar menunjukkan kerendahan dan penghinaan terhadap diri sendiri jika menjadikan Gibran sebagai ketua umum.

Pasalnya Gibran bukan merupakan kader dari Partai Golkar, terlebih dirinya masih tercatat sebagai anggota PDIP.

“Miris mendengar isu begini. Apakah Golkar akan serendah itu mau menyerahkan kursi ketua pada yang bukan kadernya? Apakah itu bukan seperti penghinaan pada Golkar?” kata Saidiman dikutip dari akun X pribadinya, Rabu, 13 Maret 2024.

Sebelum nama Gibran mencuat, Presiden Jokowi juga diisukan bakal menjadi ketua umum Partai Golkar. Terutama karena kedekatan Golkar selama ini dengan Jokowi. Bahkan, Jokowi sempat memberikan pesan kedekatannya dengan Golkar saat memakai dasi berwarna kuning beberapa waktu lalu.

Partai Golkar juga diisukan mengincar kursi Ketua DPR 2024-2029 dari PDIP yang kemungkinan besar kembali menjadi pemenang Pileg untuk ketiga kalinya. Caranya adalah dengan mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Selain itu, usulan hak angket di DPR terus digulirkan oleh kubu 01 dan 03 terkait kecurangan Pemilu 2024 yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), meski upaya untuk menghalanginya juga terus dilakukan. Partai Nasdem menantang keseriusan PDIP untuk melanjutkan usulan hak angket di DPR karena memiliki kursi terbanyak di Parlemen.

Informasi terbaru dan hangat lainnya seputar politik Tanah Air, termasuk soal Pemilihan Kepala Daerah, menjadi sajian Tabloid Info Indonesia edisi kedua Maret 2024. Selamat membaca!!!●



info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI

INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO
Sertifikat Dewan Pers
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzal Khan
PEMIMPIN REDAKSI: Rusdiyono
WAKIL PIMPINAN REDAKSI: Rahmad Romli
REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani
REDAKTUR: Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina Erlina
REPORTER: Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir
EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles
TATA LETAK: Sujatmiko
MEDIA SOSIAL: Haidir Ali
KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida
SEKRETARIS REDAKSI: Nur Aisah
PENGEMBANGAN BISNIS: M. Iqbal, Zul Fahmi
ADMINISTRASI: Ega Tri Gustina
DISTRIBUSI: Abdul Muchtar

HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/

PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

TELP 021-791 96781 FAX 021-791 96786

PALEMBANG Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang 30126

TELP : 0711-7442344



“PKS berhasil menjadi juara di DPRD DKI Jakarta, artinya kans mengajukan Anies masih terbuka. Ini menunjukkan Anies kansnya besar diajukan sebagai cagub, meski turun level dari capres”

Efriza

ANIES MAJU PILGUB DKI CUMA PENGALIHAN ISU

Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, diisukan akan maju lagi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun ini setelah kemungkinan besar gagal di Pilpres 2024.

Namun, Anies menilai kabar simpang siur tentang ia yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 merupakan pengalihan isu. Saat ini, dia mengaku masih fokus pada Pilpres 2024 yang belum jua diumumkan pemenangnya.

“Itu isu untuk mengalihkan perhatian dari persoalan Pilpres, seakan-akan Pilpresnya sudah selesai, ya kan?” kata Anies di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Jumat, 8 Maret 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta 2017–2022 itu meminta agar publik tidak terjebak dengan adanya isu dirinya maju di Pilgub tahun ini. Terutama karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan mengumumkan pemenang Pilpres selambat-lambatnya pada 20 Maret 2024. Sejauh ini, perolehan suara sementara menempatkan Prabowo-Gibran berada di posisi unggul dan hampir pasti menang satu putaran.

Perolehan suara sementara itu menimbulkan ragam pendapat mengenai arah Anies ke depan. Sejumlah pengamat menilai Anies bisa saja kembali masuk bursa Pilgub DKI karena masih memiliki ‘jatah’ untuk menjadi DKI 1.

Partai Nasdem juga telah menyatakan bahwa partai Koalisi Perubahan pengusung Anies-Muhaimin bisa melebarkan sayap koalisi ke Pilkada. Hal itu didasarkan pada semangat dan misi perubahan yang sejalan di antara Partai Nasdem, PKS, dan PKB dalam keberjalanan Pilpres 2024.

Namun, Anies beberapa kali selalu menegaskan bahwa dirinya masih fokus mengawal Pilpres 2024. Ia tidak pernah berkoalansi secara spesifik dan terang-terangan mengenai Pilgub DKI Jakarta 2024.

Anies secara pribadi mengaku sibuk melakukan pertemuan dengan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN, menjelang pengumuman Pilpres. Pertemuan itu untuk mendalami tentang dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 dan mematangkannya untuk diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sisi lain, Anies juga menilai, praktik-praktik kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung secara masif. Hal itu disampaikan Anies yang hadir melalui sambungan telepon dalam acara “Demos Festival: Omon-omon Soal Oposisi” yang disiarkan kanan YouTube @JakartaNikus dikutip Sabtu, 9 Maret 2024.

“Semua yang ada di sini

menyaksikan dalam beberapa waktu kemarin betapa praktik demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif,” katanya.

Anies menyampaikan, kecurangan dalam proses demokrasi ini harus menjadi perhatian khusus dari seluruh pihak. Dia meyakini demokrasi yang sengat dirusak masih dapat untuk dilakukan perbaikan. Dia pun mengajak masyarakat Indonesia untuk bersamasama menjaga sistem demokrasi yang dianut.

“Nah, ini harus dikoreksi dan ini harus diperjuangkan bersama,” ujarnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Presiden Jokowi ini juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang selama ini berada di barisan perubahan. Tidak hanya itu, ia juga berterima kasih karena masyarakat selama ini sudah berjuang untuk mempertahankan demokrasi.

“Terima kasih memilih untuk menjadi bagian yang menyelamatkan demokrasi, memilih menjadi bagian yang memilih demokrasi lebih baik,” ujarnya.

Anies mengajak masyarakat menjadi bagian dari penyelamatan terhadap demokrasi yang kini tengah tercoreng. Lebih lanjut, Anies mengatakan, elite saat ini hanya mementingkan kelompoknya dan mengabaikan kepentingan rakyat.

“Memilih untuk memastikan bahwa Indonesia ke depan bukan Indonesia yang praktik politiknya, praktek politik yang mengedepankan kepentingan sekelompok kecil yang raksasa, tapi yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan,” katanya.

Anies mengatakan, Indonesia saat ini berada di fase perjuangan baru, yakni fase perjuangan untuk menyelamatkan demokrasi pasca Pemilu 2024.

“Dan ini adalah sebuah fase perjuangan baru, yang kemarin hanya kontestasi, hanya kompetisi dan sekarang masuk pada fase perjuangan,” kata Anies.

Menurut Anies, ini adalah fase terberat bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya kejujuran dalam demokrasi. Karena kata Anies pada fase sekarang ini tantangan yang dihadapi sangatlah besar.

“Karena pada fase ini dihadapi dengan tantangan yang tidak kecil. Kita menyadari rakyat Indonesia menginginkan adanya rasa keadilan dan itu harus tercermin di dalam praktek demokrasi yang adil dan praktek demokrasi yang jujur,” ujarnya.

Untuk itu, Anies menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih berjuang untuk menegakkan demokrasi agar tetap berjalan pada tracknya.

“Saya sampaikan pada

semua terima kasih telah memilih untuk tetap berjuang dalam usaha kita untuk menegakkan demokrasi, demokrasi yang benar, bukan demokrasi yang dimanipulasi,” tuturnya.

Sementara itu, analis politik Citra Institute, Efriza, menilai, Anies masih memiliki hasrat untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Hal itu terlihat ketika Anies masih terus berupaya tampil di depan layar kaca membahas persoalan pilpres, salah satunya yakni soal permasalahan demokrasi di Indonesia.

“Artinya ia diduga masih punya hasrat maju di Pilgub DKI Jakarta karena kesempatan dia masih ada untuk sekali lagi,” katanya.

Selain itu, peluang Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta terbuka lebar karena partai pendukung setianya yakni PKS kini mendapatkan kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta. Efriza menambahkan, PKS kemungkinan besar akan mengusung Anies kembali di Pilgub DKI Jakarta.

“PKS juga berhasil menjadi juara di DPRD DKI Jakarta artinya kans mengajukan Anies masih terbuka. Ini menunjukkan Anies kansnya besar diajukan sebagai cagub, meski turun level dari capres, jika terpilih itu akan dinilai Anies untuk persiapan Pilpres 2029 ke depannya,” ujarnya.

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang itu memandang, wacana maju Anies di Pilgub DKI Jakarta hanya pengalihan isu saja dari gejolak Pilpres yang saat ini terjadi. Apalagi, Anies sudah tidak memiliki peluang untuk mengejar perolehan suara dari pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Hanya saja, diyakini isu ini juga sebuah upaya peng-

giringan isu, agar Anies lebih memikirkan maju ke Pilgub DKI Jakarta sekaligus untuk agar dirinya menerima saja hasil Pilpres 2024 ini,” katanya.

Efriza menilai, jika Anies sibuk dengan urusan Pilkada, maka secara otomatis gaungan hak angket kecurangan Pemilu di DPR akan menurun. Sehingga, hak angket yang digadang-gadang oleh kubu 01 dan 03 tidak akan terwujud.

“Ini artinya ada motivasi juga menggembosi upaya soliditas pengajuan hak angket. Sekali lagi, keduanya saling pengaruh, mempengaruhi, isu soal Pilgub dihadirkan sebagai bagian melihat peluang Anies dan juga memengaruhi menggembosi langkah hak angket Pemilu,” ujarnya.

Efriza mengatakan, Anies akan di Pilgub DKI Jakarta jika diminta oleh PKS. Apalagi, PKS memiliki kedekatan emosional dengan Anies, sehingga memungkinkan mengusung Anies di Pilkada DKI.

Efriza memprediksi, PKS nantinya akan berkoalisi dengan PDIP di Pilkada DKI Jakarta. Anies, lanjut Efriza, akan dipasangkan dengan kader PDIP yang memiliki pengalaman di DKI. Koalisi PKS dan PDIP akan menjadi kekuatan baru di perpolitikan Tanah Air. Apalagi, kedua partai ini satu suara untuk mengajukan hak angket kecurangan Pilpres 2024 di DPR.

Meski begitu, kemungkinan Anies akan berani bersikap maju Pilkada DKI Jakarta jika PKS meminta karena peluang menangnya tinggi. Apalagi seperti ini memungkinkan kansnya ke depan pasca Pilpres PKS berkoalisi dengan PDIP.

“Anies akan berduet dengan kader PDIP sebagai bukti koalisi kelanjutan dari Pilpres yang sama-sama merasa kalah karena dicurangi,” tutupnya. ●RDO



“Jangan-jangan Prabowo sedang merancang dan mempersiapkan demokrasi di Indonesia ke depan akan dilakukan seperti pada saat mertuanya berkuasa. Sebagaimana kita ketahui bersama pada saat Soeharto berkuasa, sistem demokrasi sangat berbeda dengan saat ini”

Fernando Emas



PRABOWO MAU UBAH SISTEM DEMOKRASI

Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 03, Prabowo Subianto, menilai, sistem demokrasi di Indonesia tidak ada kemajuan yang signifikan karena melelahkan dan butuh biaya tinggi. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

“Izinkan saya memberi kesaksian bahwa demokrasi sangat-sangat melelahkan, demokrasi sangat berantakan, demokrasi sangat costly (makan biaya). Dan, kita sampai sekarang masih tidak puas dengan demokrasi kita,” katanya.

Meski masih banyak kekurangan, menurut Prabowo, demokrasi di Indonesia masih dapat dilakukan perbaikan. Tidak hanya itu, Prabowo juga meminta kepada seluruh masyarakat tetap percaya sistem demokrasi yang sekarang dianut dapat membawa perubahan dan perbaikan bagi bangsa Indonesia ke depannya.

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga menilai, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Serentak 2024 mengalami peningkatan dari Pemilu sebelumnya. Itu ditunjukkan dari tingkat partisipatif Pemilu 2024 sebesar 80 persen. Prabowo membandingkan tingkat partisipasi masyarakat di negara demokrasi lainnya yang hanya 50 persen.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, Indonesia memiliki cita-cita besar meski masih menghadapi berbagai macam permasalahan. Namun, Prabowo meyakini Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar dan bersaing dengan negara maju lainnya seperti Amerika dan Tiongkok.

“Poin yang ingin saya sampaikan, Indonesia adalah negara yang memiliki cita-cita besar, kita memiliki masalah yang besar, kita memiliki tantangan yang besar, tapi kita memiliki aspirasi yang besar dan kita mencoba untuk mencapai aspirasi tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Founder KedaiKopi, Hendri Satrio, menilai, pernyataan Prabowo itu penuh dengan harapan. Menurutnya, harapan tersebut patut disambut baik oleh seluruh pihak.

“Dia (Prabowo) menambahkan masih ada ruang untuk perbaikan. Dan ini hal

positif harapan yang perlu diapresiasi. Nah, kalau tentang curhatan tadi melelahkan jejas demokrasi di Indonesia melelahkan itu berlangsung terus tiada henti-hentinya,” katanya.

Selain itu, pria yang akrab disapa Hensat itu menyampaikan, demokrasi Indonesia yang melelahkan dikarenakan proses tahapan antara Pemilu dengan Pilkada berdekatan. Apalagi, Pilkada 2024 akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Sehingga, partai politik membutuhkan tenaga ekstra.

“Jelas saja ada agenda-agenda ini pasti melelahkan,” katanya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Hensat mengusulkan agar seluruh ruang demokrasi tidak dibatasi. Contohnya, ketika masyarakat menyampaikan aspirasinya di muka umum. Selain itu, memberikan ruang untuk kebebasan berpendapat. Kini, lanjut Hensat, kebebasan berpendapat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan saat ini.

“Nah itu tidak perlu dibatasi,” sambungnya. Hensat menyampaikan, para elite politik tidak perlu memberikan batasan-batasan bagi demokrasi. Seyogyanya, demokrasi di Indonesia berlangsung secara natural. Jangan sampai pemerintah malah sibuk merancang kebijakan yang ujungnya memberikan batasan kepada masyarakat.

“Tapi kalau itu dibiarkan begitu saja, terbuka, tentu saja tidak melelahkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai, pernyataan Prabowo yang menyebut demokrasi di Indonesia berantakan, melelahkan, dan mahal perlu cermati dan dicurigai. Fernando berujar, Prabowo sedang menyusun siasat untuk mengubah sistem demokrasi yang selama ini dianut. Bahkan, Fernando menyinggung pemerintahan era Presiden Soeharto.

“Jangan-jangan Prabowo sedang merancang dan mempersiapkan demokrasi di Indonesia ke depan akan dilakukan seperti pada saat mertuanya berkuasa. Sebagaimana kita ketahui bersama pada saat Soeharto berkuasa, sistem demokrasi sangat

berbeda dengan saat ini,” katanya.

Fernando menjelaskan, pada era Orde Baru, pemilihan presiden dilakukan dengan sistem perwakilan karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Begitu juga dengan pemilihan legislatif dilakukan dengan sistem tertutup, sehingga yang berhak menentukan siapa yang duduk di lembaga legislatif adalah partai politik,” imbuhnya.

Menurut Fernando, masyarakat Indonesia sudah sangat menikmati sistem demokrasi yang dianut saat ini. Di mana Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Anggota Legislatif dipilih melalui pemilihan umum atau langsung dipilih oleh rakyat.

“Masyarakat sudah sangat menikmati sistem demokrasi (Pilpres dan Pileg) yang diterapkan saat ini,” katanya.

Fernando menilai, pada dasarnya demokrasi di Indonesia memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Bahkan, dunia mengakui itu. Namun, demi menekan biaya tinggi tersebut mengembalikan sistem demokrasi seperti di era Orde Baru, maka hal itu tidak dibenarkan.

Fernando mengatakan, masyarakat akan

melakukan perlawanan besar-besaran jika ada pihak-pihak yang mencoba mengembalikan sistem demokrasi ke era Orde Baru.

“Sehingga kalau ada upaya untuk menghemat sistem demokrasi kita dengan cara mengembalikan seperti sistem demokrasi pada saat Orde Baru, tentu bentuk langkah mundur dan akan mendapatkan banyak perlawanan,” ujarnya.

“Sepertinya Prabowo akan sangat menikmati sistem demokrasi seperti pada saat Soeharto berkuasa dan sepertinya akan mewujudkan dengan dukungan koalisi partai politik pendukungnya,” tambahnya menegaskan.

Fernando mengatakan, jika sistem diubah maka akan terjadi kemunduran demokrasi. Sebab, masyarakat tidak lagi menjadi pemegang kedaulatan.

“Masyarakat akan menganggap kemunduran demokrasi kalau sampai sistem demokrasi langsung diubah pada sistem demokrasi perwakilan,” ucapnya.

Fernando juga memberikan penilaian terhadap proses Pemilu Serentak 2024. Menurutnya, Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia. Banyak indikasi kecurangan yang tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk dibongkar.

“Saat Pemilu 14 Februari yang lalu tercatat dalam sejarah pelaksanaan Pemilu yang paling buruk dan akan sangat mungkin Pemilu 2029 kalau tidak ada upaya serius membongkar kebobrokan Pemilu yang lalu,” katanya.

Oleh karena itu, Fernando mendorong agar pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk bersatu dalam mengungkap kecurangan Pemilu Serentak 2024. Ia meyakini jika kecurangan pada Pemilu 2024 tidak dibongkar, maka pelaksanaan Pemilu selanjutnya tidak luput dari kecurangan.

“Sehingga saya berharap, partai pendukung paslon capres nomor 1 dan nomor 3 serius mengungkap kecurangan Pemilu 2024 sehingga Pemilu 2024 tidak akan lebih buruk karena dibiarkan tanpa ada perlawanan,” tandasnya. ●RDO





“Sehingga ini sudah tidak benar semuanya, cara-cara berpolitik kita, sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang harus kita koreksi”

Hasto Kristiyanto

SUARA GANJAR-MAHFUD DIKUNCI 17 PERSEN

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengungkapkan adanya algoritma yang digunakan untuk mengunci perolehan suara pasangan Ganjar-Mahfud agar tidak lebih dari 17 persen.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, mengatakan, hal itu diketahui ketika mendapatkan informasi dari pakar teknologi informasi.

“Misalnya dimasukkannya suatu algoritma untuk nge-lock perolehan Pak Ganjar itu hanya maksimum 17 persen,” ungkap Hasto di Election Talk FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis, 7 Maret 2024.

Sekretaris Jenderal PDIP ini menuturkan, terdapat permasalahan yang terjadi di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika meng-upload Formulir C Hasil. Kesalahan Sirekap tersebut dalam membaca Formulir C Hasil juga diakui oleh KPU.

Tidak hanya itu, Hasto juga mengendus adanya penjegalan dalam hitung cepat atau quick count yang dilakukan lembaga survei. Dari sekian banyak lembaga survei yang melakukan hitung cepat, kata Hasto, hasilnya tidak jauh berbeda.

Hasto pun mendorong agar dilakukan audit forensik terhadap Sirekap. Sebab, ketidakakuratan Sirekap dalam membaca Formulir C Hasil merugikan pihaknya. Padahal ada beberapa perolehan suara pasangan Ganjar-Mahfud unggul, tetapi saat diunggah ke Sirekap suaranya tersalip dengan paslon lainnya. Gangguan-gangguan tersebut memungkinkan Pilpres tidak berlangsung dua putaran.

“Ini yang kami lakukan sebagai bagian dari temuan-temuan yang sangat penting. Bahkan, menurut pakar IT tersebut Pemilu seharusnya berlangsung dua putaran,” katanya.

Hasto menyampaikan, TPN Ganjar-Mahfud saat ini sedang menjalin komunikasi dengan semua pihak dalam merespons gangguan-gangguan yang terjadi di Pilpres 2024. Selain itu, TPN Ganjar-Mahfud juga menjalin komunikasi dengan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) melalui Sudirman Said. Hasto menyampaikan, pihaknya juga sudah beberapa kali berdiskusi dengan Sudirman Said terkait dugaan-dugaan kecurangan pada

Pemilu Serentak 2024.

“Kami terus melakukan komunikasi, termasuk dengan beberapa partai politik di dalam menyikapi hal ini. Bahkan, tadi akan juga ada Pak Sudirman Said yang mewakili pasangan 01, kami banyak juga berdiskusi dengan Pak Sudirman Said,” imbuhnya.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD, mengatakan, soal algoritma yang mengunci suaranya itu hanya tinggal mengumpulkan bukti. Sebab, sebelumnya dirinya sudah mendapatkan informasi yang serupa.

“Sudah dikunci sekian dan angkanya persis tinggal nanti pembuktiannya saja. Ya biar diolah oleh masyarakat lah ya, itu kan sudah lama, wong sebelum pemilu kan sudah ada, sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada,” katanya kepada wartawan di Pasar Baru, Jumat, 8 Maret 2024.

Mantan Menko Polhukam ini menyampaikannya, terkait dengan kecurangan Pemilu 2024, pihaknya membuka peluang untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Dilihat saja nanti,” katanya.

Menanggapi tuduhan tersebut, Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, membantah bahwa pihaknya mengunci perolehan suara dari partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2024.

“KPU tidak pernah mematok, tidak pernah mengunci, tidak pernah menargetkan partai tertentu, pasangan calon tertentu, sejak awal harus suaranya sekian, tidak ada,” katanya kepada wartawan di Kantor KPU, Jumat,

8 Maret 2024.

Hasyim mengklaim, perolehan suara yang didapatkan partai politik, calon legislatif, dan pasangan capres-cawapres berdasarkan hitungan yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, hal tersebut masih dapat berubah ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.

“Jadi semuanya yang dihitung KPU itu adalah berasal dari perolehan suara di TPS,” ujarnya.

Menjawab bantahan Hasyim, Hasto mengklaim ada kekuatan yang begitu besar di belakang KPU selama ini. Sehingga, KPU sekarang ini tengah mendapatkan tekanan-tekanan dan intervensi pihak-pihak yang memiliki kekuatan besar. Namun, Hasto enggan menyebut pihak yang memiliki kekuatan besar tersebut.

“Ini kan kekuatan di belakang KPU, KPU sendiri nggak tau,” katanya di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 Maret 2024.

Hasto juga mengaku heran dengan KPU yang acap kali membantah adanya kejanggalan dalam penghitungan suara. Hasto pun menyoroti soal cloud milik KPU yang ternyata terhubung dengan layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba Singapura. Alibaba sendiri merupakan perusahaan asal Tiongkok.

“KPU sendiri pura-pura nggak tau ketika IP address-nya dipindahkan. Mereka menyangkal, akhirnya kalau ada bukti baru mengakui,” imbuhnya.

Menurutnya, langkah KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dibenarkan. Sebab, Pemilu merupakan sarana integrasi bangsa. Jangan tidak perlu melibatkan pihak swasta, apalagi negara asing dalam pesta demokrasi di Indonesia.

“Sehingga ini sudah tidak benar semuanya, cara-cara berpolitik kita, sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa. Ini yang

harus kita koreksi,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto yang menyebut suara pasangan Ganjar-Mahfud dikunci di 17 persen. Menurutnya, penghitungan suara yang dilakukan KPU sudah tepat. Apalagi, di setiap TPS telah diawasi oleh tim pengawas dari Bawaslu, saksi dari partai maupun masing-masing pasangan calon. Sehingga, sulit untuk melakukan manipulasi suara.

“Kalau saya ya pilih percaya dengan KPU, karena pertama ini kan data berasal dari TPS-TPS bisa dicek sebetulnya apakah data-data di TPS memang betul seperti itu, kalau tidak sesuai kan tentu masyarakat bisa protes dan bisa dilakukan koreksi,” katanya, Minggu, 10 Maret 2024.

Qodari meyakini perolehan hasil suara di Sirekap dengan quick count tidak jauh berbeda. Hal itu berdasarkan pengalamannya pada Pilpres 2019.

“Saya haqqul yakin nanti hasil Sirekap atau hitungan elektronik, dalam pilpres sebelumnya juga saya ingat walaupun ada pro kontra terhadap hitung elektronik, tetapi pada akhirnya sebetulnya tidak berbeda jauh dengan hitung manual,” bebernya.

Qodari menambahkan, ketika dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual juga akan mudah untuk membantah jika ada kecurangan. Sebab, penghitungan suara manual itu berdasarkan Formulir C Hasil Pleno.

“Nah, kalau sudah hitung manual bagaimana mau membantahnya, kan semuanya dasarnya adalah data-data tertulis data-data fisik berdasarkan hasil hitungan di C1,” tandasnya. ●RDO



“Pertimbangan lain adalah basis suara, dengan pemilihan langsung bisa dipetakan di mana kekuatan mereka. Jadi suara koalisi menurut saya tidak begitu menentukan”

Ardiyan Saptawan



HASIL PILPRES TIDAK BERPENGARUH DI PILKADA

Kondisi politik nasional tidak sama dengan situasi di daerah. Kesuksesan koalisi yang dibangun elit politik ternyata tidak berbanding dengan hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada karena punya karakter yang berbeda.

Di sisi lain para kontestan yang ikut Pilkada masih didominasi wajah-wajah lama sehingga terjadi kebosanan demokrasi di masyarakat. Sehingga butuh wajah baru yang bisa memberi warna berbeda dalam membangun daerah.

“Masalahnya partai politik kita tidak mau mengambil resiko itu karena mereka takut kalah. Inilah anehnya dengan Parpol kita di Indonesia. Lebih baik mencalonkan yang ada daripada menampilkan sosok baru namun bisa membawa perubahan lebih baik karena risikonya bisa kalah,” ungkap pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Ardiyan Saptawan.

Dosen Fisip Unsri ini mengungkapkan, pengaruh hasil Pilpres tidak terlalu berpengaruh di Pilkada namun ditentukan oleh seberapa kuat kursi di parlemen daerah. Para kandidat tentu akan memilih pasangan yang kuat di parlemen.

Sehingga perpisahan Herman Deru dan Mawardi Yahya bisa saja dipengaruhi peningkatan suara Partai Gerindra di Sumsel. Mawardi Yahya kini membidik kursi Gubernur dengan menggandeng Harnojoyo dari Partai Demokrat yang perolehan suaranya juga naik.

“Pertimbangan lain adalah basis suara, dengan pemilihan langsung bisa dipetakan di mana kekuatan mereka. Jadi suara koalisi menurut saya tidak begitu menentukan. Bahkan bisa saja ada lintas koalisi antara PDIP dan Partai Golkar yang sama-sama besar di parlemen,” ujar Ardiyan Saptawan.

Mantan anggota KPU Sumsel ini menerangkan, potensi terjadi lintas koalisi sangat besar terjadi. Herman Deru yang ditinggalkan Mawardi Yahya hingga kini belum menentukan siapa penggantinya karena melakukan berbagai pertimbangan.

Pertimbangan itu antara lain, kekuatan kursi di parlemen, cakupan basis suara dan dukungan dari partai politik. Sementara untuk ketokohan tidak berpengaruh kuat karena saat ini parpol menggunakan politik praktis.

“Contohnya Eddy Santana Putra, ketokohnya sangat kuat tapi di Pileg dia kalah suara. Sementara Mawardi Yahya, dia memang tidak mencalonkan diri di

Pileg tapi strateginya sukses meningkatkan suara Gerindra. Ketokohan dianggap ketinggalan dan tidak bisa menentukan,” ujarnya.

Siapa yang bisa menjalankan politik praktis dengan baik maka dialah pemenangnya. Dampaknya, demokrasi Indonesia masih dipimpin orang yang itu-itu saja tanpa ada terobosan yang fundamental.

Situasi juga menjalar hingga ke daerah, baik di Pilbup maupun pemilihan walikota. Sehingga akan sulit mencari tokoh muda yang bisa membawa perubahan. Imbasnya ada kebosanan masyarakat terhadap situasi politik di Indonesia.

“Masyarakat butuh yang baru. Anak muda yang bisa membawa perubahan atau memberikan sesuatu hal berbeda. Di Pileg potensi tokoh-tokoh muda sangat besar sementara di Pilkada diramalkan oleh orang-orang yang itu saja,” ungkapnya.

Ketokohan Lokal Lebih Kuat

Pandangan berbeda disampaikan Ahmad Muhaimin, Dosen Komunikasi Politik FISIP UIN Raden Fatah dan Founder IPO Institute, bahwa Pilpres memiliki ciri khas tersendiri, di mana jarak antara kandidat dan konstituen terbilang jauh. Hal ini menuntut strategi khusus dalam membangun citra dan menjangkau benak pemilih.

“Manajemen isu dan citra menjadi kunci di Pilpres. Kandidat harus memanfaatkan media massa dan media sosial secara maksimal untuk menjembatani jarak tersebut,” papar Muhaimin.

Dia mengatakan, situasi politik berbeda dengan Pilpres, Pileg menghadirkan dinamika yang berbeda. Konstituen dihadapkan pada banyak pilihan, layaknya di pasar bebas, dengan puluhan kandidat yang menawarkan program dan visi mereka.

“Di Pileg, penetrasi akar rum-

put menjadi kunci. Semakin luas dan mendalam kandidat menjangkau konstituen, semakin besar peluangnya untuk terpilih,” jelasnya.

Sementara itu, Pilkada memiliki karakteristik yang lebih personal. Jarak antara kandidat dan konstituen relatif dekat, baik secara emosional, identitas, maupun kultural.

“Jumlah kandidat di Pilkada juga lebih terbatas, sehingga konstituen memiliki pilihan yang lebih terarah. Ke-

tokohan, identitas, dan kultural menjadi faktor penting di samping gagasan dan program,” jelas Muhaimin.

Muhaimin juga sepaham bahwa tidak ada korelasi simetris antara Pilpres dan Pilkada. Kemenangan di Pilpres tidak secara otomatis menjamin efek ekor jas bagi kandidat Pilkada yang diusung oleh partai pemenang.

Partai pengusung koalisi Pilpres belum tentu sukses di Pilkada karena situasinya berbeda. Hal ini berkaitan erat dengan calon yang diusung.

“Pilkada lebih berfokus pada ketokohan dan karakter lokal. Endorsement dari pemenang Pilpres tidak selalu menghasilkan efek ekor jas jika konstituen di daerah menilai kandidat tidak layak memimpin,” paparnya.

Terkait sistem tandem antara calon gubernur dan calon walikota/bupati, Muhaimin menilai hal tersebut sulit diterapkan. Dinamika kepentingan partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sering kali tidak selaras.

“Polarisasi politik nasional juga tidak selalu terbawa ke tingkat daerah. Banyak contoh kepala daerah terpilih yang bukan berasal dari koalisi pemerintah pusat,” katanya.

Karakteristik Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang berbeda menuntut strategi dan pendekatan yang berbeda pula. Interaksi dan kedekatan antara kandidat dan konstituen menjadi faktor penting dalam menentukan hasil kontestasi di setiap tingkatan. ●RDR





“Prima Salam peraih suara terbanyak pemilu 2019 dan 2024 dapil Sumsel 1 DPRD Provinsi, sangat memungkinkan muncul sebagai kandidat Pilwako Palembang”

Fatkurohman

INFO PILKADA

Minggu II • Maret 2024

7

GERINDRA INGIN KUASAI SUMSEL

Efek kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ikut berdampak ke daerah termasuk dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel dan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Palembang 2024.

Nama Ketua DPC Gerindra Palembang Prima Salam, kini bertengger di posisi ketiga dari hasil survei elektabilitas Calon Wali Kota (Cawako) Palembang setelah Ratu Dewa dan Fitrianti Agustinda.

Seperti diketahui Gerindra adalah partai yang ketua oleh Prabowo Subianto.

Koordinator Public Trust Institute (PUTIN) Wilayah Sumsel Publik Lembaga Survei dan Kajian Politik Kebijakan Fatkurohman menjelaskan, berdasarkan hasil pemetaan (mapping) politik di Kota Palembang diprediksi ada beberapa sosok kuat untuk Pilwako.

Kandidat itu adalah Ratu Dewa yang saat ini menjabat Pj Walikota Palembang dan mantan Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda dan disusul oleh Prima Salam pada posisi tiga.

Koordinator Public Trust Institute (PUTIN) Wilayah Sumsel Publik Lembaga Survei dan Kajian Politik Kebijakan Fatkurohman menjelaskan, pihaknya melakukan pemetaan (mapping) politik di Kota Palembang.

“Jelang akhir masa kampanye pileg lalu, Ratu Dewa berada diangka rentang elektabilitas 35 - 47 persen. Kemudian Finda diangka diatas 15 persen,” kata dia Jumat 8 Maret 2024.

Dilanjutkannya sebagai kuda hitam data atau yang menempati posisi 3 ada Ketua DPC Gerindra Palembang Prima Salam diangka 5 persen dan posisi 4 Basyaruddin Ahmad (Birokrat Pemprov Sumsel), selisih tipis dengan Akbar Alfaro.

“Prima Salam peraih suara terbanyak

pemilu 2019 dan 2024 dapil Sumsel 1 DPRD Provinsi, sangat memungkinkan muncul sebagai kandidat Pilwako, apalagi sebagai ketua parpol besar di Palembang,”ucap pria yang akrab disapa Bung FK ini

Kemudian, dibawah 4 besar, ada sejumlah nama bertengger yang bisa saja menggeser elektabilitas diatasnya seperti Basyaruddin ataupun Prima Salam jika terus bergerak ke masyarakat.

“Sejumlah nama tersebut adalah Akbar Alfaro, Yudha Mahyudin, H Nasrun Umar, Syaiful Fadli dan Charma,”ujarnya.

Dalam mapping juga digambarkan meningkatnya elektabilitas Ratu Dewa, selain kapasitasnya sebagai Pj Wali Kota Palembang, masyarakat juga melihat sosok Ratu Dewa sebagai tokoh yang melekat sederhana, dekat dan perhatian pada rakyat.

“Jika nanti benar-benar maju Pilwako dan mundur jadi Pj Wali Kota Palembang bakal menjadi pesaing terberat Fitrianti Agustinda. Begitu juga dengan Finda jika ingin bersaing mulai meniming pasangan yang tepat,”terang Alumni FISIP Unsri ini.

Secara elektoral untuk bisa bersaing menuju pilkada dikatakannya, tokoh tersebut harus bisa masuk di top 4. Untuk itu, p a r a calon

kandidat harus sudah mulai untuk mendekatkan diri pada pemilih dan sosialisasi untuk mendongkrak popularitas.

“Praktis baru Ratu Dewa dan Fitrianti Agustinda yang popularitasnya sudah diatas 60 persen,”pungkasnya

Sementara itu Pengamat Politik Haekal Al-Haffafah dari Lembaga Kajian Politik Teras Indonesia menyebutkan adanya nama Finda dan Dewa sebagai nama terkuat di bursa Cawako Palembang dinilai wajar-wajar saja.

Hal itu efek karena keduanya adalah birokrat yang sering bertemu dengan warga Palembang membuat mereka lebih akrab dengan penduduk.

“Ratu Dewa dan Finda keduanya birokrat secara langsung sudah memiliki elektoral sendiri saat menjabat. Ketika mereka akan terjun akses mereka untuk kampanye lebih mudah. Mereka lebih mudah menguasai penyelenggaraan Pemilu yang biasanya lebih patuh oleh kaum birokrat,”ucapnya

Sementara, Ketua DPC Gerindra Palembang Prima Salam menyatakan, siap maju menjadi Cawako Palembang apabila benar-benar dicalonkan oleh partainya.

Hal itu tentunya terlebih lagi apabila sudah resmi mendapatkan instruksi dari Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra kebetulan Prabowo Subianto memiliki keinginan kepala daerah Palembang (Wako) harus dari kader Gerindra begitu juga kepala daerah Sumsel (Cawagub).

“Masalah

mencalonkan jadi Wali Kota Palembang kalau sudah takdirnya nanti saya siap, saya percaya takdir jadi jalankan saja. Pak Prabowo juga menginginkannya pemimpin Palembang harus kader Gerindra,”kata dia dikutip dari channel YouTube @InfoIndonesiaTV.

Dia menyebut tujuan pribadinya apabila menjadi Wali Kota Palembang hanya ingin mendapatkan tiket ke surga dengan cara bisa memiliki alat menghisap dosa dengan cepat.

“Kalau saya jadi Wali Kota Palembang ingin masuk surga, contohnya kita salat saja kadang lewat. Saya pernah bertanya kepada ustadz bagaimana cara masuk surga? Kata ustadz jadilah kepala daerah yang amanah itulah alatnya,”diceritakannya.

Prima Salam berkata untuk mengambil hati warga Palembang tidak harus melakukan pencitraan di media sosial atau medsos seperti di Instagram dan aplikasi lainnya.

“Mau menang itu ada kekuatan partai ulama dan sebagainya. Palembang ini paku buminya kuat, bukan rakyat Palembang memilih kepala daerahnya tapi Palembang itu sendiri. Di Palembang ini banyak habaib (habib) merekalah yang akan memilihnya,”ceplusnya

Dia berniat apabila benar-benar ditakdirkan menjadi Wali Kota Palembang menang di Pilkada 2024 ada salah satu visi dan misi yang akan diwujudkan.

Visi dan misi itu adalah mau menjadikan kota empek-empek ini, benar-benar mewujudkan dirinya sebagai kota Palembang Darussalam.

“Kekurangan di Palembang banyak sekali seperti banjir, BUMD dan edukasi rakyatnya karena sampai sekarang Palembang belum jadi Palembang Darussalam. Konsep Palembang Darussalam itu adalah kota Palembang agamis penuh tenggang rasa, rakyat makmur tidak sedikit-sedikit fitnah dan bergunjing, itu belum terwujud. Kalau saya jadi kepala daerah nantinya pun cukup gaji saja tidak mau main proyek-proyek,”pungkasnya.

•IRY



“Ini tentu sudah diprediksi karena Mawardi Yahya tentu punya hasrat untuk mengulangi kesuksesan di Pilpres 2024 dengan menggandeng Harnojojo”

Bagindo Togar



HERMAN DERU DAN MAWARDI YAHYA BERPISAH

Bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 mulai mencuatkan nama mantan Wakil Gubernur Mawardi Yahya yang kini memilih untuk berpisah dengan mantan Gubernur Herman Deru.

Herman Deru dan Mawardi Yahya sebelumnya sempat menyatakan kembali bersama di Pilgub Sumsel 2024.

Duet Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) dianggap pasangan paling kuat dibanding para pesaing karena mereka ada-lah petahana.

Namun rencana itu batal setelah melihat hasil Pilpres 2024 karena keduanya ber-beda partai dan koalisi. Efek Pilpres 2024 ternyata menetes hingga ke daerah dan mempengaruhi peta politik Pilkada.

Mawardi Yahya memilih untuk berpisah dan menyatakan siap maju sebagai Cagub Sumsel 2024 berpasangan dengan mantan Wali Kota Palembang, Harnojojo.

Pengumuman tersebut ditandai dengan Mawardi Yahya membuat surat kesepakatan bersama dengan Harnojojo sebagai bukti pengikat maju bersama di Pilgub Sumsel 2024 mendatang.

Mawardi Yahya bersama Harnojojo menunjuk Syahril Oesman sebagai kepala tim sukses kemenangan keduanya.

Dipilihnya Harnojojo, diungkap Mawardi Yahya karena sama-sama memiliki penilaian untuk memimpin Sumsel.

“Selama ini kita sama-sama menilai satu sama lain, untungnya sama klop, insyaallah menurut saya dapat sinkron dalam memimpin Sumsel kedepan,” ujarnya.

Lebih jauh Mawardi Yahya meminta publik dapat menilai sendiri latar belakang mereka nantinya.

“Dinilai sendiri bagaimana latarbelakang kami berdua, salah satunya bisa latarbelakang ke daerahan perlu. Kita pimpinan Sumsel, ingat kita ada 17 kabupaten kota, insyallah kombinasi ini ditambah panglima Syahril Oesman mudah mendapatkan keberhasilan nantinya,” tuturnya.

Mawardi pun menyebut dengan pengalaman politik mulai dari ketua DPRD dua kali, bupati dua kali hingga wakil Gubernur.

Begitu juga pasangan Harnojojo sempat ketua DPRD dan Walikota dinilai cukup untuk berjuang membangun Sumsel.

Perpisahan ini banyak sudah diprediksi sebelumnya apalagi setelah melihat hasil Pilpres 2024 yang memenangkan pasangan 02, Prabowo-Gibran.

“Ini tentu sudah diprediksi karena Mawardi Yahya tentu punya hasrat untuk mengulangi kesuksesan di Pilpres 2024 dengan meng-



gandeng Harnojojo. Hal ini membuktikan kalau efek koalisi di Pilpres menetes hingga ke daerah,” ungkap pengamat politik Bagindo Togar kepada Info Indonesia.

Pecahnya HDMY di Pilgub Sumsel 2024 adalah efek ekor jas atau coat tail effect Pilpres 2024.

Mawardi Yahya yang merupakan Dewan Penasehat Partai Gerindra tentu ingin meneruskan kesuksesan koalisinya di Pilgub Sumsel bersama Harnojojo yang merupakan kader Partai Demokrat.

Sebagai mantan Walikota Palembang, Harnojojo dianggap punya faktor besar mendukung perolehan suara di ibukota Sumsel tersebut.

“Apalagi kita melihat saat ini Partai Demokrat sedang hangat-hangatnya menikmati koalisi bersama Jokowi dan Prabowo. Keputusan ini tentu didukung penuh oleh AHY karena koalisi berjalan mesra di daerah,” ujar Direktur Forum Demokrasi Sriwijaya.

Di sisi lain, Herman Deru juga akan meneruskan koalisinya bersama PKB dan

PKS dengan menggandeng politisi PKB yakni Prana Putra Sohe mantan Walikota Lubuklinggau.

Dengan demikian Partai Nasdem, PKB dan PKS juga akan berkoalisi di Pilgub Sumsel untuk bersaing Partai Gerindra, Demokrat, Partai Golkar dan PAN yang kemungkinan sepakat mendukung Mawardi Yahya - Harnojojo.

Menurut Koordinator Public Trust Institute (PUTIN) Wilayah Sumsel Publik Lembaga Survei dan Kajian Politik Kebijakan Fat-

kurohman ada dua tokoh yang memiliki basis ke daerah cocok yang akan dipilih oleh Herman Deru.

“Dalam politik itu tetap mementingkan popularitas dan elektabilitas. Kalau saya lihat Herman Deru akan mementingkan dua faktor itu dia bisa saja memilih Heri Amalindo dan Nanan,”kata dia

Menurutnya Heri Amalindo Bupati PALI dan mantan Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe memiliki basis daerah yang sangat kuat.

Hal itu diprediksinya saat Alex

Noerdin yang memiliki basis di Musi Banyuasin bergabung dengan Ishak Mekki memiliki basis Ogan Komering Ilir terbukti bisa memenangkan Pilkada.

“Saya rasa kenapa cocok soalnya Nanan memiliki basis MLM Musi Rawas-Linggau-Musi Rawas Utara jadi sangat ideal kalau bersama mantan Wako Lubuklinggau ini. Bisa juga Herman Deru memilih Heri Amalindo kalau dia independen tanpa dicalonkan oleh partai beliau memiliki basis di PALI,”ungkapnya

Dilanjutkannya memilih calon wakil gubernur (Cawagub) pasangan Herman Deru pastinya harus berbasis dengan kedaerahan.

Lantaran Mawardi Yahya memilih Harnojojo karena memiliki basis di Palembang sebagai mantan Wali Kota Palembang.

“Bisa saja ada nama-nama lain yang nantinya dipilih oleh Herman Deru bisa juga Jonck Muhammad dan Eddy Santana Putra. Keduanya juga memiliki basis ke daerahnya yang kuat. Tetapi secara elektabilitas Herman Deru pastinya sekarang masih memilih-milih,”terangnya

Sementara Heri Amalindo yang merupakan pengurus PDI Perjuangan juga akan semakin bulat untuk ikut bersaing di Pilgub Sumsel.

“Untuk wakilnya, dia bisa menggandeng Popo Ali, Bupati OKU Selatan. Sebelum jadi bupati, Popo Ali sempat berstatus politisi dari PPP,” sambung Bagindo.

Dengan pecahnya HDMY maka Pilgub Sumsel akan diikuti tiga calon yang didukung partai koalisi di Pilpres 2024.

Yang lebih menarik semua kandidat ini punya DNA juara semua dan serta semuanya menyandang sebagai kepala daerah dua periode.●IRY





“Keberadaan Heri Amalindo dan Popo Ali Martopo hanya akan menguntungkan Mawardi Yahya. Dari sini saja sudah jelas keunggulan Mawardi lebih signifikan dari kedua kontestan lainnya”

Ade Indra Chaniago

HERI AMALINDO AKAN MENGUNTUNGKAN MAWARDI YAHYA

Setelah mantan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya mendeklarasikan diri akan maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumsel 2024 bersama mantan Wali Kota Palembang, Harnojoyo. Nama lain ikut menyusul dan siap mendeklarasikan diri.

Sebut saja Herman Deru yang juga menyatakan maju sebagai petahana Cagub Sumsel 2024, nama lain yang sudah sejak lama menyatakan diri maju juga adalah Heri Amalindo, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Herman Deru yang merupakan mantan Gubernur Sumsel akhirnya secara tegas menyatakan kembali mencalonkan diri sebagai jawaban dari deklarasi Mawardi Yahya yang memilih untuk berpisah dengan dirinya.

Setelah ditinggal Mawardi Yahya, Herman Deru digadang-gadang merangkul SN Prana Putra Sohe yang merupakan mantan wako Lubuklinggau, Sumsel.

Sedangkan Bupati PALI, Heri Amalindo dikabarkan akan menggandeng Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo.

Dari ketiga nama bursa calon Pilgub Sumsel 2024 bagaimana kekuatan pertarungan mereka di Pilkada, mari kita petakan

mulai dari kekuatan elektabilitas, elektoral dan kekuatan partai pendukung?

Pengamat Politik Sumsel Ade Indra Chaniago menilai secara elektabilitas poin untuk tiga kontestan berimbang sama-sama pertahanan dan dikenal atau populer. Namun kalau diukur dari kekuatan geopolitik pasangan Mawardi Yahya-Harnojoyo dirasakan lebih memiliki sumber suara yang cukup besar dibandingkan Herman Deru-SN Prana Putra Sohe dan Heri Amalindo-Popo Ali

Martopo.

“Kalau kita lihat kekuatan basis suara Mawardi itu di OKI dan OI, sedangkan Harnojoyo Lahat, Pagaram dan Palembang,”ungkapnya.

Basis suara Herman Deru ada di OKU Raya dan SN Prana Putra Sohe di MLM (Musi Rawas, Lubuklinggau, Musi Rawas Utara).

Selanjutnya Heri Amalindo berkekuatan di Musi Raya dan Popo Ali Martopo OKU Raya.

“Dari sana jelas suara dari Herman Deru di OKU Raya pecah karena terbagi dengan Popo Ali, disana jelas diuntungkan Mawardi, suara cukup besar yang mereka miliki tidak terpecah,”kata dia.

Hadirnya nama Heri Amalindo dinilai hanya menjadi pelengkap penderita di Pilgub Sumsel 2024 bahkan membuat posisi Herman Deru akan sulit mengalahkan Mawardi Yahya.

Pasalnya, suara OKU Raya tidak lagi dikuasai Herman Deru secara bulat dan harus berbagi dengan Popo Ali Martopo. Lalu disisi lain elektabilitas Heri Amalindo pun tidak akan bisa kalahkan Herman Deru apa lagi popularitas Mawardi Yahya di Sumsel.

“Keberadaan Heri Amalindo dan Popo Ali Martopo hanya akan menguntungkan Mawardi Yahya. Dari sini saja sudah jelas keunggulan Mawardi lebih signifikan dari kedua kontestan lainnya,”jelasnya.

Dari segi geopolitik Harnojoyo disebutkan, memiliki basis masa yang cukup besar karena menjadi pertahanan dua periode Wako

Palembang.

Menurut Ade Indra Chaniago, Palembang memiliki banyak pemilih. Justru lebih banyak dari jumlah daerah lain di Sumsel.

“Jumlah penduduk Palembang 1,7 juta, sedangkan mata pilihnya sebanyak 1,2 juta. Sedangkan MLM kalau digabungkan hanya 600 mata pilih saja. Walaupun terkesan lebih banyak dari Palembang, MLM tetap saja kalah. Apa lagi Harnojoyo juga memiliki basis masa di Lahat dan Pagaram sebagai kota kelahiran keluarganya. Dari sini jelas basis masa Mawardi dan Harnojoyo cukup besar ditinjau dari geopolitik,”beberny.

Ditambahkannya, Meski Mawardi Yahya sudah mendeklarasikan diri bersama Harnojoyo, rumor terbaru adalah Partai Gerindra mengeluarkan nama lagi untuk Cagub di Pilgub Sumsel 2024.

Nama tersebut adalah mantan Wali Kota Palembang dua periode Eddy Santana Putra (ESP). Hanya saja kebenaran ESP Maju sebagai Cagub Sumsel belum bisa dipastikan dan bisa juga sebagai gerakan politik sengaja untuk melihat elektabilitas antara ESP atau Mawardi Yahya.

“Ada juga ESP tetapi kita lihat saja nanti bisa jadi ESP akan menjadi kuda hitam di Pilgub 2024 atau hanya rumor saja sebab dia dikabarkan juga dicalonkan oleh Gerindra,”ceplosnya.

Sementara itu Pengamat Politik dari FISIP Unsri Ardiyan Sap-tawan menganalisis ketiga calon bursa Pilgub 2024 yakni pasangan Mawardi Yahya-Harnojoyo,

Herman Deru-SN Prana Putra Sohe dan Heri Amalindo-Popo Ali Martopo dari sisi kekuatan partai.

“Kalau saya menilai bukan dari wilayah mereka melainkan kekuatan partai. Karena mereka bukan caleg yang harus turun kelapangan tetapi kekuatan mesin partai mereka,”jelasnya

Dilanjutkannya dari kekuatan partai baru-baru ini di Sumsel bukan secara nasional disebutnya posisi pertama itu dipegang oleh Gerindra, kedua Golkar dan posisi ketiga baru PDI Perjuangan. Dari sana saja dia sudah melihat kekuatan dari ketiga calon itu dimenangkan oleh Mawardi Yahya merupakan kader dari partai Gerindra.

“Makanya karena berada di urutan pertama hanya berkoalisi dengan Harnojoyo dari Demokrat dia sudah bisa mengusung dirinya sebagai Cagub Sumsel 2024. Disana jelas Nasdem tidak kuat di Pemilu 2024 ini,”jelasnya

Disebutkannya pasangan Herman Deru-SN Prana Putra Sohe dan Heri Amalindo-Popo Ali Martopo harus memiliki koalisi besar untuk bisa mengusung mereka sebagai Calon Gubernur di Pilkada 2024 nanti.

“Untuk menjadi calon pengusung tunggal harus memiliki 20 persen suara sah saat Pemilu. Sedang tidak ada partai yang mencapai 20 persen hanya Gerindra 18 persen teratas dibawahnya Golkar posisi kedua dan posisi ketiga PDI Perjuangan itu tingkat kemenangan partai di Sumsel,”ucapannya

Diakuinya, Herman Deru-SN Prana Putra Sohe dan Heri Amalindo-Popo Ali Martopo sulit untuk mengalahkan Mawardi Yahya-Harnojoyo dari kekuatan partai.

“Kalau ada yang bilang koalisi Mawardi Yahya-Harnojoyo adalah koalisi Pilpres Prabowo dan Gibran antara Gerindra dan Demokrat saya rasa tidak. Mungkin ini ide dari pribadi di lokal atau kedua konstan saja sebab karena baru-baru menang dan sosialisasi kenapa tidak mencari partai koalisi saat Pilpres. Karena dari pusat belum ada instruksi adanya koalisi Pilpres sampai berlanjut ke daerah,”pungkasnya.

● IRY





Kartika Sandra Desi

Mawardi Yahya Gandeng Harnojoyo GERINDRA BELUM MERESTUI

Majunya mantan Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel 2024 ternyata belum mengantongi restu dari Partai Gerindra.

Meski begitu, Mawardi Yahya telah mendeklarasikan diri maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumsel 2024 bersama mantan Wali Kota Palembang, Harnojoyo sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumsel.

Keputusan maju mengikuti kontestasi ini murni merupakan keputusan pribadi Mawardi Yahya, bahkan boleh jadi ini bagian strategi politik dari anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel, Kartika Sandra Desi mengatakan, keputusan keduanya yang ingin berpasangan merupakan hasil kesepakatan pribadi dan belum melibatkan partai politik.

Ia menjelaskan, ini merupakan komitmen antara Mawardi Yahya dan Harnojoyo, dengan poin-poin tertentu.

“Kan banyak poin-poinnya, jadi belum ada bawa partai. Ini baru komitmen pribadi mereka berdua,” kata Kartika, Minggu 10 Maret 2024.

Sehingga, keputusan tersebut belum mendapat pembahasan di ranah partai. Meski begitu, wanita yang akrab disapa Cici ini menghargai keputusan Mawardi Yahya yang kedepannya akan menjadi salah satu pertimbangan partai dalam menentukan sikap pada Pilkada mendatang.

“Ibaratnya tuh mereka berdua sudah dapat chemistry dan cocok kemudian menyatakan diri maju,” ucapnya.

Mawardi Yahya menyatakan diri resmi berpisah dari Herman Deru, setelah ia mengumumkan menggandeng Harnojoyo sebagai pasangannya di Pilgub Sumsel 2024 yakni pada 27 November 2024 mendatang.

Ia pun menunjuk Syahril Oesman sebagai ketua Tim Pemenangan Mawardi Yahya-Harnojoyo.

Mawardi Yahya memberikan alasan memilih Harnojoyo sebagai pasangan untuk maju di Pilgub Sumsel 2024.

“Selama ini kita sama-sama menilai satu sama lain, untungnya sama klop, insyaallah menu-
r u t

saya dapat sinkron dalam memimpin Sumatera Selatan kedepan,” ujarnya

Lebih jauh Mawardi Yahya meminta publik dapat menilai sendiri latar belakang mereka nantinya.

“Dinilai sendiri bagaimana latarbelakang kami berdua, salah satunya bisa latarbelakang ke daerahan perlu. Kita pimpinan Sumatera Selatan, ingat kita ada 17 kabupaten kota, insyallah kombinasi ini ditambah panglima Syahril Oesman mudah mendapatkan keberhasilan nantinya,” tuturnya.

Seperti diketahui, Partai Gerindra kini sedang berjaya setelah berhasil mengantarkan kemenangan bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Efek Pilpres 2024 ternyata menetes hingga ke daerah dan mempengaruhi peta politik Pilkada. Mawardi Yahya sebelumnya merasa tenang sebagai Wakil Gubernur mendampingi Herman Deru kini berubah arah dan menyatakan HDMY tidak ada lagi di Pilgub Sumsel 2024.

Perpisahan ini banyak sudah diprediksi sebelumnya apalagi setelah melihat hasil Pilpres 2024 yang memenangkan pasangan 02, Prabowo Subianto-Gibran sebagai pemenang.

Pecahnya HDMY di Pilgub Sumsel 2024 adalah efek ekor jas atau coat tail effect Pilpres 2024. Ma-
wardi Yahya

yang merupakan Dewan Penasehat Partai Gerindra tentu ingin meneruskan kesuksesan koalisinya di Pilgub Sumsel bersama Harnojoyo yang merupakan kader Partai Demokrat.

Sebagai mantan Walikota Palembang, Harnojoyo dianggap punya faktor besar mendukung perolehan suara di ibukota Sumsel tersebut.

Manuver politik yang dilakukan oleh partai Gerindra menimbulkan beragam statement dari kader partai-partai besar yang ada di Sumsel, salah satu Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Momon Wahyudi mengatakan, Mawardi Yahya merupakan Kader Gerindra sehingga mencalonkan diri untuk Pilgub Sumsel 2024 adalah hal yang wajar.

“Menurut saya, langkah tersebut sah-sah. Karena itu merupakan haknya partai, apalagi melihat iklim demokrasi di Sumsel untuk lebih banyak calon tentu semakin

bagus,” tutur Momon.

Langkah Mawardi Yahya mendeklarasikan diri sebagai Cagub Sumsel dari jauh-jauh hari agar bisa memetakan partai koalisi.

“Kedepannya pasti akan melakukan penjajakan politik dengan partai-partai lain dan mungkin juga akan melakukan penjajakan dengan partai yang ada di Parlemen,” tegasnya.

Saat ini, pihaknya menunggu arahan dan mengamati jalur manuver politik yang akan dilakukan. Pasalnya, bisa saja jika Partai Gerindra disebut akan menguasai Sumsel, namun perlu diingat bahwa masih banyak partai lain dengan elektabilitas yang tidak bisa dianggap enteng.

“Apalagi partai Gerindra tidak cukup kursi untuk mengusung wakilnya sendiri dan tentunya harus berkoalisi dan kita juga belum tahu partai mana saja yang akan merapat,” ungkapnya.

Meski demikian, Momon menyebut Partai Gerindra di Sumsel belum

menang telak karena untuk perolehan kursi legislatif di Sumsel berimbang dengan PKB, tidak terlalu mendominasi karena tidak ada partai yang mendominasi.

“Kita akan melihat Gerindra mengambil arahnya kemana ketika ke arah rasionalis biasanya pasangannya ke religius, kita lihat saja manuver politik Gerindra kedepan, karena sampai saat ini belum ada komunikasi juga, mungkin dengan seiring waktu akan ada komunikasi ke kita,” urainya.

Melihat deklarasi Mawardi Yahya dan Harnojoyo sebagai Cagub dan Cawagub Sumsel 2024, pihaknya akan menghitung dan menakar calon lain yang juga memiliki kekuatan.

“Kalau seandainya nanti bisa berpasangan dengan kader partai PKB tentu kami sangat senang apalagi berdampingan dengan Cagub petahana, semoga kekuatan politiknya tidak terlalu jauh, apalagi ada kader kita yang bertarung tentu akan menjadikan spirit kedepan,” tutup Momon.

•IRY



Mawardi Yahya

Harnojoyo



“Alhamdulillah kalau memang masyarakat menaruh kepercayaan untuk pak Ridho Ficardo maju (Pilkada) kembali”

M Husni

PENANTANG MAKIN POPULER, PETAHANA TUMBANG

Nama mantan Gubernur Lampung periode 2014-2019 Ridho Ficardo kembali muncul dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2024.

Bahkan berdasarkan hasil polling Calon Gubernur (Cagub) Lampung 2024 di website Polling-Kita.com, Ridho Ficardo unggul dengan perolehan 27,1 persen suara.

Polling tersebut dibuat pada 4 Maret 2024 pukul 07:30 WIB, dan ditutup pada 7 Maret 2024, pukul 07.30 WIB.

Ridho yang kini bergabung di Partai Perindo itu meraup 1.106 suara, dari total 4.087 suara yang mengikuti polling.

Pada posisi kedua adalah Ketua Partai Gerindra Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

Sosok yang sedang menjabat posisi DPRD Lampung ini meraih perolehan presentase 21 persen atau 860 suara.

Posisi ketiga ada mantan Wali Kota Bandar Lampung dua periode sekaligus ketua Partai Nasdem Lampung Herman HN dengan perolehan 16 persen atau 255 suara.

Menyusul posisi selanjutnya tempat Politis PDIP yang juga mantan Bupati Tubaba Umar Ahmad dengan perolehan 9,1 persen atau 372 suara.

Berikutnya ada Taufik Basari dengan 8,5 persen atau 347 suara.

Selanjutnya posisi ke enam, ada mantan Kapolda Lampung Edward Syah Pernong dengan 5,8 persen dengan 237 suara.

Lalu nama mantan Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri menempati posisi ke tujuh dengan mendapah dukungan di angka 2,8 persen atau 115 suara.

Sementara gubernur petahana Arinal Djunaidi justru tumbang berada di peringkat kedelapan dengan perolehan polling 2,7 persen atau 112 suara.

Selain nama-nama tersebut, sejumlah nama tokoh lain yang turut muncul dalam polling diantaranya Dendi Ramadhona, Chusnunia Chalim, Bachtiar Basri, Musa Ahmad, Sudin, Zainal Asikin MS, dan Toto Jumariono.

Menanggapi hasil polling tersebut, Ketua Pemuda Perindo Lampung M Husni mengaku tersanjung apabila masyarakat masih menginginkan

Ridho Ficardo memimpin Bumi Ruwa Jurai kembali.

Namun kata dia, saat ini sosok Ridho Ficardo masih akan melihat perkembangan ke depan.

“Alhamdulillah kalau memang masyarakat menaruh kepercayaan untuk pak Ridho Ficardo maju (Pilkada) kembali.” Ujar M Husni.

Diakui Husni, hasil polling ini bisa jadi pemantik semangat untuk jadi pemimpin Lampung.

“Hasil polling ini menjadi pemantik semangat bagi kami untuk Lampung 1, meskipun masih melihat perkembangan ke depannya seperti apa. Mohon doanya saja,” jelasnya.

Sementara hadirnya sosok calon penantang muda, Rahmat Mirzani Djausal juga terbilang lawan yang kuat.

Kehadiran Mirza yang sukses membesut Partai Gerindra Lampung di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 ini, berbanding terbalik dengan kinerja Arinal Djunaidi di masa pertama kepemimpinannya sebagai seorang gubernur.

Prestasi pertama yang paling menonjol dari Rahmat Mirzani Djausal, adalah keberhasilan menahkodai relawan Prabowo-Gibran di Lampung.

Dari hasil sementara, Rahmat Mirzani Djausal yang didaulat sebagai dewan pembina relawan Prabowo-Gibran Lampung, mampu membawa pasangan calon presiden-Wapres 02 itu dengan suara mencapai hingga 70 persen.

Tidak hanya itu,

Partai Gerindra Lampung di bawah kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal, kemungkinan besar merajai kursi di gedung DPRD Provinsi Lampung tahun ini.

Sehingga sangat pantas jika Rahmat Mirzani Djausal untuk menjadi pesaing terkuat dalam Pilgub Lampung 2024.

Terlebih, di bawah kepemimpinan Arinal Djunaidi, Lampung dianggap belum menjadi provinsi yang maju di Pulau Sumatera.

Bahkan yang menjadi masalah utama kepemimpinan Arinal Djunaidi, adalah sorotan langsung Presiden Joko Widodo terkait ruas jalan di Lampung yang rusak parah.

Tentu, perbaikan jalan provinsi yang ditangani langsung sang presiden menjadi tanda tanya besar di tengah-tengah masyarakat Lampung.

Masyarakat mempertanyakan, anggaran yang seharusnya disisihkan Pemprov Lampung untuk perbaikan infrastruktur tak berhasil sedikit pun memperbaiki ruas jalan dari Kotagajah hingga Bandar Surabaya di Lampung Tengah.

Dengan kondisi yang seharusnya menguntungkan Rahmat Mirzani Djausal, akankah Pilgub tahun ini juga menjadi peralihan kekuasaan dari incumbent ke sang penantang.

Kondisi menguntungkan lainnya bagi Rahmat Mirzani Djausal adalah sosok sang ayah Faisol Djausal.

Tokoh masyarakat Lampung yang juga dikenal sebagai kontraktor besar di Provinsi Lampung itu, akankah Faisol mau menggocek sedikit kantongnya untuk sang putra mahkota agar duduk sebagai orang nomor satu di Lampung.

Terlebih, dengan kekuatan modal yang dimiliki sang ayah dan juga kekuatan jaringan politik yang saat ini Rahmat Mirzani Djausal, diyakini akan mampu mengikat korporasi yang hampir selalu ada di setiap kontestasi Pilgub Lampung.

Nama lain yang kini bertengger di posisi ketiga adalah Mantan Wali Kota Bandar Lampung dua periode, Herman HN, yang juga telah menyatakan kesiapannya untuk berkoalisi dengan partai lain guna maju dalam Pilgub.

Herman HN dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon Gubernur Lampung. Dia bersedia berkoalisi dan berpasangan dengan siapapun demi membawa Lampung menuju masa depan yang lebih baik.

Keputusan ini diambil karena ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Lampung masih perlu menjalin koalisi dengan partai lain agar bisa maju dalam Pilgub mendatang.

Perolehan kursi Nasdem pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Lampung diproyeksikan akan mencapai 10 kursi DPRD Provinsi atau setara dengan 11,76 persen suara.

Namun, untuk dapat mengusung calon tanpa berkoalisi, syaratnya adalah minimal harus memperoleh 17 kursi atau setara dengan 20 persen dari total 85 kursi DPRD Provinsi Lampung.

“Kita siap maju, namun tentu kita butuh dukungan dana,” ungkap Herman HN.

“Iya, karena dengan 10 kursi yang kita miliki (DPRD Provinsi), kita masih memerlukan 17 kursi untuk bisa melangkah maju sebagai calon,” tambahnya.●IRY



“Otomatis gugur, kan kemarin salah satu muatan revisi UU Pilkada itu adalah memajukan Pilkada dari November ke September karena MK sudah memerintahkan tetap November”

Achmad Baidowi



DPR NGOTOT REVISI UU PILKADA

DPR tetap mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan untuk mengubah jadwal Pilkada.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyebut, pertimbangan revisi UU Pilkada bukan hanya soal percepatan jadwal Pilkada 2024 dari November ke September. Salah satu pertimbangannya adalah 271 daerah yang kepala daerahnya akan habis masa jabatannya pada Desember 2024. Menurutnya, tidak tepat jika pemerintah pusat selalu menunjuk penjabat.

“Makanya, kalau kami tetap mendorong supaya terjadi revisi undang-undang itu (Pilkada). Kemudian, keserentakan pelantikan DPRD. Selama ini kita juga nggak diatur itu, jadi ada pelantikannya Agustus, September, Oktober, November gitu loh. Nah, jadi itu yang kemudian harus, juga perlu diatur di undang-undang atau revisi undang-undang itu,” kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu, 10 Maret 2024.

Menurut Doli, adanya putusan MK terkait larangan untuk mengubah jadwal Pilkada dapat menjadi bahan kajian sebelum merevisi UU Pilkada. Sebab sekali lagi disampainya, revisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan percepatan jadwal dari November ke September.

“Surpres-nya (revisi UU Pilkada) sudah masuk, jadi surpres-nya itu sudah tiga bulan yang lalu sebetulnya dikirim. Nah tinggal pimpinan saja. Jadi kami tinggal nunggu pimpinan kapan itu diagendakan di dalam rapat bamus dan kemudian diserahkan itu dibahas di mana gitu,” ujar Doli.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengakui satu alasan mendesak yang membuat pemerintah ingin mempercepat Pilkada 2024 dari November ke September. Jika Pilkada Serentak 2024 tak dipercepat pemungutan suaranya, maka akan ada potensi kekosongan kepala daerah di banyak daerah.

Sebab, kondisi saat ini, terdapat 101 daerah dan empat daerah otonomi baru di Papua yang diisi oleh penjabat kepala daerah sejak 2022. Lalu, terdapat 170 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah pada 2023. Serta terdapat 270 kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Berdasarkan data ini, maka terdapat potensi akan terjadi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Jika ini terjadi, maka pada 1 Januari 2025 terdapat 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif. Karenanya, pemerintah perlu diambil langkah yang sifatnya strategis dan mendesak untuk menghindari kekosongan kepala daerah tersebut. Terlebih lagi adanya perbedaan kewenangan antara kepala daerah definitif dan penjabat.

Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Achmad Baidowi alias Awiek, mengatakan, revisi UU Pilkada terkait jadwal pelaksanaan Pilkada 2024 otomatis gugur. Sebab, dalam revisi tersebut hendak mengubah pelaksanaan pilkada dari November ke September. Hal ini menyusul putusan MK yang melarang jadwal Pilkada 2024 diubah, yang tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024. Artinya, pilkada tetap digelar pada November mendatang.

“Otomatis gugur, kan kemarin salah satu muatan revisi UU Pilkada itu adalah memajukan pilkada dari November ke September karena MK sudah memerintahkan tetap November,” kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Meski begitu, revisi UU Pilkada belum dicabut dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas). Sebab, draf revisi yang sudah disusun tak hanya berkaitan dengan jadwal pelaksanaan Pilkada serentak. Oleh karenanya, revisi UU Pilkada masih bisa dilakukan asalkan bukan terkait dengan jadwal pelaksanaannya.

“Kalaupun mau direvisi ndak masalah, tetapi menyangkut jadwal tidak berubah. Kan revisinya kemarin tidak hanya soal jadwal.

T a p i

terkait dengan pengaturan lain-lain. Kalau terkait dengan jadwal kita harus merujuk putusan MK. Apapun putusan MK suka tidak suka itu setara dengan putusan konstitusi yang harus ditindaklanjuti, harus diikuti,” kata Awiek.

Dalam naskah akademiknya, ada tiga pertimbangan yang membuat DPR memilih untuk merevisi UU Pilkada. Pertama adalah bahwa seluruh kepala daerah definitif akan berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024. Kondisi tersebut membuat seluruh daerah tak memiliki kepala daerah definitif pada Januari 2025.

Pertimbangan kedua, dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan hubungan dan tata kelola pemerintahan antara

kepala daerah dengan DPRD. Termasuk sinkronisasi dan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Ketiga, adanya pertimbangan kebutuhan hukum di masyarakat atas beberapa putusan MK. Karena tiga pertimbangan tersebut, diperlukan revisi UU Pilkada yang akan menjadi perubahan yang keempat.

Sebelumnya, Anggota DPR Komisi II DPR, Guspari Gaus, menjelaskan, keputusan merevisi UU Pilkada kini berada di tangan pemerintah. “Saya kira Pimpinan DPR sudah bersurat juga kepada pemerintah dalam menyikapi keputusan terkait percepatan pilkada itu,” ungkap Guspari.

Jika pemerintah tidak juga mengirimkan Surpres dan DIM terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah. Disebutkan dalam Pasal 101 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemungutan suara Pilkada 2024 digelar pada November 2024.

“Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September. Kalau mau buat undang-undang, kan, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” kata Guspari.

Meski demikian, Guspari meminta penyelenggara pemilu tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. “Agenda-agenda ke depan harus mereka sudah hadapi. Mereka juga sudah buat PKPU terkait tahapan-tahapan pilkada, sudah dibahas dan disetujui juga oleh kami. Jadi silakan dilanjutkan,” kata politisi Fraksi PAN ini.

Guspari tidak memungkiri, sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi salah satu alasan Fraksi PAN setuju merevisi UU Pilkada. Alasan lain adalah sinergi anggaran pusat dan daerah serta perencanaan pembangunan pusat dan daerah.

•RDO





“Kita ingin juga agar kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, jasa, perbankan, dan lain-lain. Intinya adalah kira-kira sama dengan New York Amerika, atau Sydney Melbourne-nya Australia”

Tito Karnavian

INFO

EKSEKUTIF

13

Minggu II • Maret 2024

KEBUT PEMBAHASAN RUU DAERAH KHUSUS JAKARTA

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dibahas lebih lanjut. Dia menekankan, pembahasan itu harus tetap memperhatikan keselarasan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Mendagri mengungkapkan, pemerintah mengapresiasi dan menyambut baik penyampaian hak inisiatif DPR yang mengusulkan RUU tentang Provinsi DKJ.

“Terutama penghargaan kami sampaikan kepada seluruh pimpinan DPR karena sudah diketok dalam paripurna yang lalu dan juga Badan Legislasi yang sangat proaktif, serta juga DPD,” ujar Mendagri pada Rapat Kerja Badan Legislasi DPR dengan agenda Pembahasan RUU tentang Provinsi DKJ di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, RUU tersebut merupakan amanat dari Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Dia juga menyampaikan komitmen bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam mewujudkan visi bersama membangun Jakarta menjadi kota kelas dunia. Harapannya, Jakarta tak hanya memiliki daya saing di tingkat regional Asia Tenggara, tetapi juga setara dengan kota-kota maju lainnya di dunia.

“Kita ingin juga agar kota Jakarta menjadi salah satu pusat utama di bidang perekonomian, jasa, perbankan, dan lain-lain, intinya adalah kira-kira sama dengan New York Amerika, atau Sydney Melbourne-nya Australia,” jelas Mendagri.

Di lain sisi, Mendagri juga menyampaikan sejumlah isu penting yang perlu kesepahaman dalam forum pembahasan RUU tentang Provinsi DKJ. Hal itu seperti terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ.

“Sikap pemerintah tetap pada posisi dipilih atau tidak berubah sesuai dengan yang sudah dilaksanakan saat ini, bukan ditunjuk, sekali lagi, karena dari awal draf kami draf pemerintah sikapnya dan drafnya juga isinya sama,

dipilih bukan ditunjuk,” terangnya.

Isu lainnya, lanjut Tito, yakni mengenai masa transisi perpindahan IKN dalam hal belum tersedianya sarana dan prasarana fisik secara memadai. Kondisi ini membuat penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan masih dapat dilaksanakan secara fisik pada kantor-kantor kementerian dan lembaga yang berada di wilayah DKJ. Hal ini sesuai amanat Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur kedudukan, fungsi, dan peran IKN tetap berada di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta hingga ditetapkan tanggal pemindahan IKN melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Kemudian isu lainnya yaitu mengenai persoalan kawasan aglomerasi, pengelolaan ruang laut, dan kewenangan khusus. Adapun kewenangan khusus ini penting untuk menunjang Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Ini seperti di bidang pemerintahan, keuangan, perizinan berusaha, penanggulangan banjir dan persampahan, serta perkeretaapian atau transportasi massal.

“Oleh karena itu, yang kita anggap penting betul untuk mendorong Jakarta menjadi kota global yang sesuai dengan harapan kita tadi kami kira kewenangan khusus ini dapat diberikan sebagai UU lex specialis,” jelasnya.

Mendagri juga menyampaikan bahwa pemerintah berharap pembahasan RUU tentang Provinsi DKJ dapat segera diselesaikan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan keberadaan Ibu Kota Jakarta sehingga statusnya jelas.

“Kita harus konsisten dengan amanat dalam UU IKN (Ibu Kota Negara), UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 41 ayat 2, yang mengamanatkan bahwa revisi UU Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah UU IKN diundangkan,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan, UU IKN tersebut disahkan pada 15 Februari 2022, sehingga revisi UU tentang DKJ mestinya telah selesai pada 15 Februari 2024. Karena itu, Mendagri mendorong DPR agar segera menyelesaikan pembahasan revisi regulasi tersebut. Pihaknya mengaku telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR pada Januari 2024. Namun pembahasan itu diundur lantaran adanya pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari.

Apabila pada masa sidang ini pembahasan dilakukan, maka diharapkan revisi dapat segera rampung. Terlebih, saat ini masih ada waktu hingga masa sidang selesai pada 4 April 2024 mendatang.

Mendagri meny-

ampaikan, upaya penyelesaian itu dapat dilakukan dengan bekerja maraton baik oleh Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin) dengan membahas satu per satu DIM. Jika langkah itu diterapkan, dirinya optimistis revisi UU tentang Provinsi DKJ dapat segera diselesaikan, sehingga tidak menjadi beban moral atas ketentuan yang sudah disepakati bersama.

“Oleh karena itu, untuk kepastian hukum kami mohon dengan segala hormat kita konsekuen menyelesaikannya, konsisten menyelesaikannya di masa sidang ini,” jelasnya.

Menanggapi soal partisipasi publik, Mendagri menyampaikan dalam proses revisi UU upaya tersebut harus dilakukan. Sebelumnya, Kemendagri maupun DPR juga telah menghimpun partisipasi publik dalam merumuskan draf RUU tentang Provinsi DKJ.

“Kalau masih ada yang menganggap kurang nanti dari Tim Panja, bisa saja diundang,” jelasnya. • RDO



“Dan memang itu bagian dari proses yang harus dilewati. Itulah yang kita lakukan (memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang)”

Herwyn JH Malonda



PSU KUALA LUMPUR MASIH CARUT MARUT

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan langsung proses pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengawasan langsung itu dilakukan buntut kasus pemalsuan daftar pemilih yang berujung pada ditetapkannya 7 Panitia Penyelenggara Luar Negeri (PPLN) sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

Anggota Bawaslu, Puadi, mengungkapkan, pada proses pemungutan suara ulang, Minggu, 11 Maret 2024, Bawaslu menilai penyelenggara Pemilu Luar Negeri mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, Bawaslu memberikan beberapa catatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur.

“Hanya saja memang yang perlu jadi catatan itu partisipasi, kaitannya dengan pemilih ini tentunya berkurang,” ungkapnya di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu, 11 Maret 2024.

Sementara itu, Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan, pemungutan suara ulang dengan metode tempat pemungutan suara (TPS) dan ko-

tak suara keliling (KSK) menghadirkan permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi pemilih.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu ini menyampaikan, metode yang digunakan pada pemungutan suara ulang ini menurunkan partisipasi masyarakat. Namun, di satu sisi, daftar pemilih khusus (DPK) meningkat drastis.

Lolly mengatakan, PSU kali ini didapatkan pada kesulitan untuk mengontrol pemilih DPK yang keberatan untuk menunggu satu jam sebelum waktu pencoblosan berakhir, seperti yang terjadi di KSK 020, 102, dan 103. Sehingga, pemilih yang enggan menunggu, lebih memilih untuk meninggalkan TPS.

“Secara substansi adalah kerepotan mengarahkan pemilih DPK yang ingin dilayani lebih awal. Padahal kita punya kepentingan agar yang DPT tidak kehabisan surat suara,” katanya saat melakukan pengawasan langsung PSU di Kuala Lumpur.

Hal tersebut menimbulkan pemilih DPK melakukan intimidasi terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) juga Pengawas TPS/KSK LN. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, kasus tersebut terjadi di KSK 39 di wilayah Klang.

Intimidasi yang dilakukan tidak hanya disebabkan oleh ketidaksabaran pemilih, namun juga karena pemilih yang tidak terima ditegur oleh pengawas dan KPPS ketika diketahui melanggar ketentuan, seperti memotret kertas suara yang sudah dicoblos, mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu kandidat di area KSK, mengintip pemilih lain ketika mencoblos hingga mengganggu keamanan. Atas kejadian tersebut, Bagja mengungkapkan Bawaslu

akan melakukan tindakan terhadap pemilih yang melanggar.

“Kami akan bertindak dan juga mengumpulkan buktinya. Bahkan, mereka berani terhadap supervisi yang dilakukan Bawaslu. Kami juga mengantongi beberapa terduga yang melakukan intimidasi,” katanya.

“Kami akan sampaikan ke Sentra Gakumdu untuk dilakukan penegakan hukum agar menjadi evaluasi dan juga menjadi perhatian masyarakat yang ingin melakukan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu kedepan,” tegasnya.

Beberapa catatan lain dikatakan Lolly juga terjadi seperti pembukaan yang tidak tepat waktu, tidak ada pembacaan sumpah pada pembukaan TPS, di TPS tidak ditempel DPTLN, keterbatasan personil di bagian pendaftaran yang membuat panitia yang menginput data untuk memastikan akurasi data pemilih mengalami beberapa hambatan.

“Nah, inilah mengapa sentral informasi menjadi penting. Jadi berbagai peristiwa intimidasi itu beragam. Ada yang sampai mengharuskan skorsing juga ada yang bisa dijelaskan,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, menyampaikan, pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur pada dasarnya merupakan rekomendasi

Bawaslu kepada KPU selaku penyelenggara tahapan Pemilu. Herwyn menjelaskan, rekomendasi tersebut bukanlah

basar. Bawaslu selaku pengawas Pemilu mendapati ada kesalahan dalam proses pemutakhiran data pemilih di Kuala Lumpur. Sehingga, pemilih di sana tidak sesuai dengan daftar pemilih tetap yang telah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, daftar pemilih tetap di Kuala Lumpur ada sebanyak 420 ribu. Namun, PPLN Kuala Lumpur hanya mencolli sekitar 12 persen dari jumlah daftar pemilih tetap. Oleh karena itu, Bawaslu menilai, ada yang kesalahan yang dilakukan PPLN dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Menurut Herwyn, pemungutan suara ulang ini proses yang memang harus dilakukan KPU atas rekomendasi Bawaslu.

“Dan memang itu bagian dari proses yang harus dilewati. Itulah yang kita lakukan (memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang),” jelasnya, Senin, 11 Maret 2024.

Terkait adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Herwyn mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. Namun, Bawaslu mendapatkan informasi ada salah satu masalah dalam pemungutan suara ulang dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK).

“Tapi ya secara sekilas ada satu KSK tidak bisa dilaksanakan, sehingga di lokasi yang sudah ditentukan kawan-kawan KPU justru dilaksanakan di tempat pelaksanaan TPS. Memang hanya beberapa persoalan administrasi yang memang tidak terlalu besar,” ungkapnya.

Herwyn mengatakan, tahapan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur saat ini masih dalam proses penghitungan suara yang nantinya akan dikirimkan ke KPU. Bawaslu juga akan tetap melakukan pengawasan melekat. Selain itu, beberapa pimpinan Bawaslu juga melakukan pengawasan secara langsung pada tahapan pemungutan suara ulang tersebut.

“Sekarang kalau nggak salah masih oleh sebagian melakukan penghitungan, sekaligus lanjutan rekapitulasi penghitungan suara di 120 KSK dan 22 TPS,” katanya.

Terkait adanya calon legislatif (caleg) yang hadir ketika pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, pihaknya belum menemukan indikasi pelanggaran. Pada dasarnya, Bawaslu tidak melarang kepada siapapun untuk hadir atau melihat proses pemungutan suara ulang, sepanjang tidak membawa atribut kampanye atau lainnya.

“Asalkan tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang bisa mengarah kepada satu kampanye, kemudian kedua mengarahkan pemilih supaya memilih yang bersangkutan. Nah, ini yang lagi kita tunggu (laporan pelanggaran) dari Kuala Lumpur,” tandasnya. • RDO





“KPU memiliki anggaran besar yang semestinya dapat digunakan untuk membangun teknologi informasi, maupun portal layanan informasi publik yang tidak seburuk saat ini”

Egi Primayogha

INFO
KPU

15

Minggu II • Maret 2024

SIREKAP BUKA PRAKTIK KECURANGAN PERHITUNGAN SUARA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan belum akan membuka diagram perolehan suara pada situs pemilu2024.kpu.go.id. Saat ini, KPU fokus pada rekapitulasi berjenjang secara nasional.

“Jadi sekarang fokus aja dulu, teman-teman atau masyarakat luas bisa melihat dinamika forum bagaimana kemudian persoalan-persoalan itu dibicarakan, ditelusuri, sehingga fokusnya ke situ,” kata Anggota KPU, August Mellaz, di Kantor KPU, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

Kendati begitu, Mellaz mengatakan proses unggah formulir C.Hasil tetap dilakukan pada situs Sirekap. Masyarakat pun bisa melihat foto formulir tersebut.

“Tapi yang jelas Sirekapnya kan tetep aktif karena semua formulir untuk Sirekap kan memang didedikasikan sebagai data base untuk dokumentasi, untuk mengkurasi semua data-data yang berasal dari TPS. Kemudian kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi nanti juga nasional dalam bentuk formulir model C.Hasil model D.Hasil baik yang kecamatan kabupaten kota provinsi sampai nasional,” ungkapnya.

Kepala Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, mengatakan, KPU semestinya segera memperbaiki Sirekap. Keputusan menghilangkan grafik data perolehan suara dalam Sirekap berpotensi membuka praktik kecurangan perhitungan suara.

“Praktik jual beli suara adalah salah satu kecurangan yang berpotensi marak terjadi,” kata Egi dalam keterangan resmi, Rabu, 13 Maret 2024.

Adapun KPU berlasan menutup akses informasi grafik data perolehan suara Pemilihan Umum 2024 di Sirekap, karena adanya kekeliruan pembacaan alat bantu penghitungan suara itu. Akibatnya, data perolehan suara tidak sesuai dengan hasil di tempat pemungutan suara dan menimbulkan prasangka dari publik.

Padahal, menurut Egi, keterbukaan informasi dengan menampilkan perbedaan tersebut bisa membuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam mengawasi hasil pemilu.

“Hal itu juga menjadi cerminan jelas dari ketidaksiapan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024,” kata Egi.

Pada 27 Februari 2024, kata dia, KPU telah memberikan respons atas permintaan

informasi yang dilayangkan ICW lima hari sebelumnya, mengenai permasalahan tersebut. Namun jawaban KPU mengecewakan.

Jawaban KPU tidak memuaskan ICW sebagai pemohon informasi lantaran hanya memberikan ringkasan dan tidak memberikan dokumen dalam bentuk rincian.

ICW bahkan menerima jawaban mengenai anggaran Sirekap hanya dalam satu kalimat, yakni: “Anggaran Pembangunan Sirekap Tahap 1 sebesar Rp3.906.589.500 (sudah termasuk pajak)”. Tidak ada informasi rincian anggaran yang diberikan oleh KPU kepada ICW.

“ICW, oleh karena itu, telah mengajukan surat keberatan pada 13 Maret 2024,” ujarnya.

Selain itu, jawaban permintaan informasi dikirimkan oleh KPU kepada ICW melalui alamat email ppidkuri2019@gmail.com. Alamat email tanpa domain resmi dari KPU tersebut membawa kami pada keraguan atas keseriusan KPU dalam membangun teknologi informasi.

“Sementara, KPU memiliki anggaran besar yang semestinya dapat digunakan untuk membangun teknologi informasi, maupun portal layanan informasi publik yang tidak seburuk saat ini,” kata Egi.

Anggota Komisi II DPR, Guspari Gaus, mengatakan, akan meminta pertanggungjawaban KPU terkait kekusutan Sirekap yang digunakan sebagai alat bantu dalam mempublikasikan hasil perhitungan dan rekapitulasi suara 2024 agar dapat dipantau masyarakat dan transparan. Namun, saat ini, KPU menutup tabulasi suara pada Sirekap.

“Saat ini timbul fenomena yang aneh-aneh akibat dari Sirekap perhitungan manual yang dihentikan. Sekarang yang ber-

masalah adalah Sirekap. Tabulasinya dihilangkan karena ada protes. Padahal biaya pengadaan Sirekap tidak tanggung-tanggung,” ujar Guspari, Senin, 11 Maret 2024.

Sirekap adalah alat bantu yang dapat memberikan akses pada masyarakat mengenai kondisi objektif perhitungan suara. Guspari menuturkan perhitungan atau rekapitulasi suara yang sah adalah perhitungan manual.

Namun, menurutnya, pengelolaan Sirekap diindikasikan tidak dikerjakan secara profesional. Saat digunakan, Sirekap

mendapat sorotan terkait dugaan penggelembungan suara hingga ketidaksinkronan data dalam Sirekap dengan data hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

“Padahal, informasi teknologi (IT) alatnya sangat canggih. Harusnya tidak ada kondisi yang menimbulkan pertanyaan dari berbagai elemen masyarakat,” terang Guspari.

KPU, tegasnya, harus mempertanggungjawabkan keberadaan Sirekap. Menurutnya apabila sistem itu belum siap, kenapa dulu dipaksakan untuk diadakan sebagai alat bantu publikasi yang akhirnya pemanfaatannya tidak maksimal.

“Tentu menimbulkan pertanyaan dan praduga terhadap KPU yang melakukan pengadaan Sirekap. Pertama soal profesionalitas pengelolaannya. Kedua pengadaan alat ini ternyata tidak bermanfaat padahal biayanya luar biasa,” cetus Guspari.

Ia mengatakan Komisi II DPR dijadwalkan akan segera menggelar rapat kerja bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan pemerintah. Dalam rapat itu, menurutnya kekusutan Sirekap turut dibahas. Saat ditanya apakah akan ada desakan audit terhadap Sirekap dari anggota dewan, Guspari menuturkan hal itu akan diputuskan dalam rapat.

“Ini akan dibahas, kalau tidak salah hari Kamis (14/3/2024) jadwalnya. Pasti tentu ini akan dipertanyakan oleh anggota Komisi II apakah akan dilakukan audit karena investigasi terhadap kasus Sirekap atau bagaimana tentu kita serahkan pada hasil rapat,” tukasnya. ●RDO





BANDARA GATOT SOEBROTO WAY KANAN BERI MANFAAT BESAR BAGI SUMSEL

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung penuh reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.

Untuk mewujudkan hal tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyatakan siap mendukung percepatan reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan bersama seluruh pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Sumsel, Kabupaten OKU, dan Kabupaten OKU Selatan Sumsel.

Dukungan seluruh daerah ini menjadi dasar utama bagi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menyetujui aktivasi bandara tersebut. Menhub Budi Karya Sumadi bahkan mengupayakan ketersediaan pesawat ATR guna mendukung percepatan reaktivasi bandara.

“Ops pertama itu pesawat ATR, itu kami upayakan untuk disediakan ya, kami akan upayakan semaksimal mungkin. Tapi pada prinsipnya kami akan upayakan percepatan reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan akan segera beroperasi untuk komersil kembali,” kata Menhub di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI), Jakarta.

“Ini jadi bisa silahkan dilakukan saja reaktivasi aja. Itu berita baiknya ya,” tegas Menhub.

Keputusan ini membuat Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menyambut baik opsi dari Menhub Budi Karya Sumadi. Dia berharap reaktivasi Bandara Gatot Soebroto akan kembali beroperasi sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 mendatang.

“Terima kasih Bapak Menteri, bahagia sekali kami. Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah bisa beroperasi,” ucap Fatoni.

Fatoni mengatakan dalam audiensi kali ini seluruh kepala daerah baik itu di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung yang berdekatan dengan lokasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan hadir langsung. Hal ini sebagai bentuk komitmen nyata dari mereka guna mewujudkan rencana reaktivasi bandara tersebut.

“Ini lengkap semua Bupati yang hadir sebagai bentuk komitmen, kami juga sudah melakukan MoU dengan mereka,” kata Fatoni.

“Kebetulan juga dari Kemendagri mengawal ini terus, waktu itu juga saya kebetulan selaku Dirjen Keuangan Daerah tau cara menganggarkannya walaupun belum ada anggarannya itu bisa dianggarkan melalui BTT Pak, itu bisa dialokasikan. Jadi saya minta dari Bapak-bapak Bupati, Kadishub



provinsi segera menggeser anggaran dengan perubahan peraturan kepala daerah terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) ini dan surat dari Kemendagri sudah disiapkan untuk pergeseran anggaran ini,” sambungnya.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya mengaku Pemerintah Kabupaten Way Kanan sudah menyiapkan anggaran khusus guna percepatan reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan.

“Terima kasih Pak Menteri, jadi kami sudah banyak membangun kantor yang baru untuk keberangkatan dan kedatangan. Kami sudah dianggarkan, kami ready anggarannya. Kami prinsipnya siap,” kata Adipati.

Kemudian, Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Lanosin juga sangat berharap pengaktifan kembali Bandara Gatot Soebroto Way Kanan. Hal ini dikarenakan Kabupaten OKU Timur nantinya akan mendapatkan keuntungan dari seluruh penerbangan yang ada.

“Jadi atas yang diprakarsai tempo dulu OKU Timur siap, bahwasanya OKU Timur lah yang dapat berkah dari semua penerbangan yang ada. Saya mohon izin untuk segera dioperasikan,” ucapnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Baturaja juga berharap pada Kementerian Perhubungan untuk dapat menghibahkan shuttle menuju Bandara Gatot Soebroto Way Kanan jika sudah beroperasi kembali.

Senada dengan hal tersebut, Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo mengaku siap berkomitmen dan mendukung semaksimal mungkin dikarenakan demi kebutuhan masyarakat luas juga mempromosikan wisata di daerah

tersebut.

“Wisata OKU Selatan, yaitu Danau Ranau sangat indah sekali namun permasalahannya adalah terkait transportasi. Besar harapan kami dengan adanya bandara ini membuat wisata lebih bagus. Ada bendungan Tiga Dihaji, Insya Allah tahun ini bendungan akan selesai,” kata Popo.

“Jadi sekali lagi kami siap mendukung seoptimal mungkin karena ini nantinya akan jadi manfaat bagi kami,” lanjutnya.

Siap Dukong Reaktivasi

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni memastikan reaktivasi Bandara Ga-

tot Soebroto Way Kanan Lampung yang berbatasan langsung dengan tiga kabupaten Provinsi Sumatera Selatan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Untuk itu kita hadirkan seluruh Bupati yang ada di situ. Ada Bupati Way Kanan, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU, OKU Selatan dan Lampung Barat dan Pemda siap mendukung ini,” ucap Fatoni kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Bahkan Pemda dari sisi anggaran sudah siap mendukung. Kemudian komunikasi dengan perusahaan-perusahaan pendukung sudah siap. Bandara sudah siap hanya perlu pembenahan sebentar, sedikit lagi sudah lebih siap lagi.

Bandara Gatot Subroto Way Kanan sangat penting karena bukan hanya satu daerah saja yang menerima manfaat, melainkan akan ada enam kabupaten sekaligus. Salah satu faktornya adalah lokasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan berada di perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

“Yang terdekat justru itu di Kabupaten OKU Timur ibukotanya Martapura, kemudian Way Kanan, Baturaja, Muaradua kemudian Lampung Barat. Ini semua mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat dan bisa dioperasikan oleh masyarakat Sumsel dan Lampung,” kata Agus Fatoni.

Keberadaan Bandara Gatot Soebroto di Kabupaten Way Kanan, Lampung, selama ini hanya digunakan untuk keperluan TNI Angkatan Darat menjadi kemewahan yang hanya dilihat dari jauh. Dengan dibukanya penerbangan sipil di Bandara Gatot Soebroto dengan landas pacu seluas 2.100 meter x 40 meter, masyarakat dapat menikmati kemewahan konektivitas udara. • RDR





“Jadi yang kita pastikan buka rute penerbangan itu Bali dan Batam ya”

Budi Karya Sumadi

SIAPKAN MUDIK GRATIS SERENTAK UNTUK MASYARAKAT SUMSEL

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) segera meluncurkan program Gerakan Mudik Gratis Serentak se-Sumsel (GMGSS). Program ini merupakan upaya konkret dalam mengakomodir keinginan masyarakat yang hendak mudik lebaran di kampung halaman pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah mendatang.

Program mudik gratis ini sudah digagas beberapa tahun sebelumnya dan manfaatnya cukup dirasakan masyarakat Sumatera Selatan.

“Kami ingin menginformasikan kepada rekan-rekan media bahwa Pak Gubernur telah meluncurkan program mudik gratis, yang mana mudik gratis ini diperuntukan untuk masyarakat Sumsel,” ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumsel Ari Narsa di kantor Gubernur Sumsel Palembang, Sumatera Selatan.

Nantinya, Pemprov Sumsel akan menyiapkan dua jenis moda transportasi melalui jalur darat, yaitu menggunakan bus dan kereta api.

Untuk keseluruhan ada 18 bus dengan total penumpang kurang lebih 700 orang, begitu juga dengan kereta api terdapat dua rute masing-masing satu rangkaian, untuk dalam Provinsi rute yang tersedia dimulai dari Palembang, Muara Enim - Lahat - Tebing Tinggi - Kota Padang - Lubuk Linggau dengan jumlah penumpang 529.

Sedangkan untuk luar provinsi, di antaranya Palembang - Prabumulih - Baturaja - Martapura - Tanjung Karang (Lampung) dengan jumlah penumpang 520 orang.

Nantinya pendaftaran mudik gratis akan dibuka secara online pada tanggal 20 Maret 2024. Terkait jadwal keberangkatan akan dilakukan pada tanggal 6 dan 9 April 2024 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Mudik gratis ini akan dilepas langsung Pj Gubernur pada 6 April nanti. Kami juga telah merencanakan sekitar tanggal 20 Maret pendaftaran mudik gratis akan dibuka se-

cara online. Kita juga bekerja sama dengan pihak Jasa Raharja untuk penumpang darat diberikan asuransi selama 7 hari,” ucap Ari.

Adapun syarat tambahan bagi masyarakat yang hendak menjadi peserta mudik gratis, harus menunjukkan bukti telah membayar pajak kendaraan dengan menunjukkan STNK asli secara fisik atas nama yang bersangkutan.

“Kita utamakan penduduk yang berdomisili di Sumsel baik itu Kota maupun Kabupaten. Adapun bukti lunas pajak kendaraan ini kita lakukan untuk membuat masyarakat taat membayar pajak,” tandasnya.

Buka Rute Penerbangan Palembang-Bali

Berbagai fasilitas mudik juga akan disiapkan Pemprov Sumsel termasuk jalur penerbangan menuju ke Provinsi Sumat-

tuk membuka rute penerbangan baru, yaitu Palembang-Bali.

“Jadi yang kita pastikan buka rute penerbangan itu Bali dan Batam ya,” ucap Menhub.

Saat ini, sudah terdapat rute penerbangan yang melayani langsung rute Palembang-Batam namun masih belum terlalu banyak. Sehingga Menhub memastikan akan ada penambahan rute penerbangan baru untuk destinasi tersebut.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengusulkan pembukaan rute penerbangan baru, yaitu Palembang-Bali, Palembang-Batam, Palembang-Singapura dan Palembang-Batam.

Hal ini dikarenakan permintaan yang cukup tinggi, terutama saat perayaan Hari Raya Imlek dan Hari Raya Idul Fitri.

“Kami ingin mengajukan penambahan

rute penerbangan, pertama ke Bali, Batam, Singapura dan Malaysia. Data kami dengan manajer bandara itu kemarin cukup tinggi permintaan ke sana cukup banyak,” ucap Fatoni.

“Agak nyambung apalagi dengan kalau ada imlek, karena banyak orang Chinese. Ini yang kami pertimbangkan untuk rute penerbangan baru Pak,” sambungya.

Menurutnya, momen Hari Raya Imlek menjadi momentum untuk menambah pendapat daerah. Ini dikarenakan, melalui penerbangan langsung rute tersebut Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II akan ramai oleh wisatawan.

“Sebenarnya kita ini kalau Imlek saja sudah lumayan (pendapatannya) karena ada hubungan emosional dengan hubungan emosional Palembang dengan Imlek,” kata Fatoni.

Selain itu, melalui kesempatan ini Fatoni



era Selatan. Salah satunya dengan membuka jalur penerbangan dari Bali ke Sumsel yang diusulkan Pj Gubernur, Agus Fatoni kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Melihat potensi yang ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui usulan un-

Rute Mudik Gratis Serentak Provinsi Sumsel:	
1.	Palembang - Lahat - Pagar Alam - Pendopo,
2.	Palembang - Lahat - Tebing Tinggi,
3.	Palembang - Musi Banyuasin - Lubuklinggau - Musi Rawas Utara,
4.	Palembang - Kayu Agung - Belitang - Muara Dua,
5.	Palembang - Muara Enim - Baturaja - Martapura - Muaradua.
Rute Luar Provinsi Sumsel :	
1.	Palembang - Padang Sidempuan (Medan),
2.	Palembang - Kota Medan,
3.	Palembang Bukit Tinggi (Padang),
4.	Palembang - Solok - Lubuk basung (Padang),
5.	Palembang - Solo (Terminal Tipe A Tirtanadi),
6.	Palembang - Surabaya (Terminal Tipe A Purabaya).

juga mengharapkan aktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan secepatnya. Menurutnya, kehadiran Bandara Gatot Subroto Way Kanan sangatlah penting. Ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang besar dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar.

“Kami sampaikan kebutuhannya sangat besar juga potensinya sangat besar dan bandara juga sudah siap. Oleh karena itu, kita sampaikan semua, kita hadirkan seluruh Bupati yang ada di situ, ada Kabupaten Way Kanan, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU, OKU Selatan dan Lampung Barat dan Pemda siap mendukung ini,” jelas Fatoni.

Nantinya, bukan hanya satu daerah saja yang nantinya menerima manfaat, melainkan akan ada enam Kabupaten/Kota sekaligus. Salah satu faktornya adalah lokasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan berada di perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

•RDR

“Overall kinerja pak Apriyadi sudah sangat baik. Beberapa program bisa diatasi dan dijalankan dengan baik”

Brigjen Pol Rustam Mansur



KINERJA APRIYADI SUDAH SANGAT BAIK

Sebagai Penjabat Bupati Musi Banyuasin (Muba) banyak pencapaian yang dilakukan Apriyadi Mahmud selama memimpin Kabupaten Muba. Berbagai keberhasilan yang dilakukan membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan puas dan masuk dalam kategori sangat baik.

Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali melakukan evaluasi terhadap Pj Bupati Apriyadi Mahmud untuk triwulan III periode ke-2 tahun 2024 di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta.

“Overall kinerja pak Apriyadi sudah sangat baik. Beberapa program bisa diatasi dan dijalankan dengan baik. Salah satunya penanganan inflasi dan langkah konkrit memberikan kemudahan untuk berinvestasi,” ungkap Inspektur I Inspektorat Jenderal Kemendagri Brigjen Pol Rustam Mansur.

Lanjutnya, implementasi kebijakan untuk mempermudah investasi dapat menjadi legacy yang sangat baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Muba.

“Saya sangat apresiasi peraturan yang sudah diterbitkan pak Apriyadi dalam kemudahan berinvestasi di Muba, ini akan menjadi legacy yang sangat baik,” ucapnya.

Selain itu, koordinasi dan sinergi yang dilakukan Pj Bupati Apriyadi Mahmud dengan FKUB dan Forkopimda dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah sangat berjalan baik.

“Tetap pertahankan upaya-upaya ini dan terus memaksimalkan sinergi bersama FKUB dan Forkopimda demi menjaga kondusifitas daerah,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendagri Dr Elfin Elyas dengan menyatakan kalau penanganan inflasi di Muba sangat baik dan menyajikan data yang sudah bagus.

“Secara overall sudah oke, terus maksimalkan program yang sudah berjalan. Terutama upaya penanganan inflasi dan stunt-ing,” katanya.

Ia meminta, agar Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud juga memaksimalkan edukasi dan sosialisasi pencegahan informasi hoaks yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan di Muba.

“Ini sangat penting untuk menjaga keamanan wilayah dan meminimalisir konflik yang tidak diinginkan,” ujarnya.

PPUPD Ahli Utama Itjen Kemendagri Drs Azwan MSi mengatakan, di sisa beberapa bulan lagi jabatan Pj periode kedua ini, diharapkan Pj Bupati Apriyadi terus meningkatkan kinerja demi kepentingan masyarakat Muba.

“Tetap maksimalkan kinerja di sisa masa jabatan periode kedua dan meningkatkan performa pelayanan publik di Kabupaten



Muba,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Bupati Apriyadi Mahmud mengucapkan terima kasih pada para evaluator Itjen Kemendagri yang sangat membantu Pemkab Muba dalam memberikan masukan untuk mengimplementasikan program-program.

“Kami sangat berterima kasih atas masukan yang selama ini diberikan kepada kami. Selama ini Tim Evaluator Itjen Kemendagri sangat membantu Pemkab Muba,” tuturnya.



Ia menambahkan, Pemkab Muba akan terus meminta masukan kepada Itjen Kemendagri agar benar-benar dapat menjalankan program Pemerintahan yang tepat dan berdampak kepada masyarakat.

“Apa yang sudah dilakukan Pemkab Muba hingga saat ini tentu tidak terlepas dari support dan masukan dari Tim Evaluator Itjen Kemendagri,” pungkasnya.

Kebut Pengentasan Kemiskinan

Salah satu langkah penting Apriyadi Mahmud adalah pengentasan kemiskinan. Tidak tanggung-tanggung, di tahun anggaran 2024 ini Pj Bupati Apriyadi Mahmud menggarap sebanyak 549 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Bumi Serasan Sekate.

Pemkab Muba dibawah komando Pj Bupati Apriyadi Mahmud juga sangat

menggencarkan program pengentasan kemiskinan, tidak hanya mengandalkan beberapa program saja namun di setiap OPD terlibat aktif memasifkan program pengentasan kemiskinan.

Alhasil, kemiskinan ekstrem di Muba pada tahun 2023 turun drastis menyentuh angka 0.9 persen dari sebelumnya di tahun 2022 4.7 persen.

“Jadi di tahun 2024 ini akan ada 549 rumah yang akan mendapatkan bantuan pro-

sebesar

Rp22.950.000.000 untuk melakukan bedah rumah ke sebanyak 459 unit rumah.

“Nama programnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program ini diyakini dapat dengan masif mengurangi kemiskinan,” ucapnya.

“Program bedah rumah ini akan terus berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambah Ridho.

Kadinsos Muba Ardiansyah merinci, adapun 80 unit bantuan bedah dari Dinsos Muba menyasar di tiap Kecamatan di Kabupaten Muba.

Dimana Dinsos Muba telah menyiapkan anggaran Rp3.2 Miliar untuk bedah 80 unit RTLH yang menyasar 15 Kecamatan di Muba. Diantaranya 5 unit di Sanga Desa, Babat Toman 3 unit, Batanghari Leko 10 unit.

Kemudian di Kecamatan Plakat Tinggi 7 unit, Lawang Wetan 5 unit, Sungai Keruh 3 unit, Sekayu 28 unit, Lais 7 unit, dan Kecamatan Keluang sebanyak 8 unit.

“Lalu, dari Baznas Muba 10 unit mengucurkan anggaran sebesar Rp291.370.000 juta, semoga program RTLH ini dapat berdampak lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan serta menurunkan angka kemiskinan di Muba,” pungkasnya.

Sebelumnya, Susi Susanti (45) warga Desa Tenggaro Kecamatan Keluang, mendapatkan jatah bedah rumah atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) program Dinas Sosial Muba yang sudah selesai dilakukan.

“Alhamdulillah kondisi rumah kami sudah sangat baik yang diperbaiki pak Bupati Apriyadi, kami tidak menyangka kalau pak Bupati Apriyadi ingin bertandang langsung,” ungkap ibu satu orang anak ini.

Ia mengaku, jatah perbaikan bedah rumah yang diberikan sangat bermanfaat terlebih kondisi kehidupan sehari-hari terbatas karena hanya mengandalkan pendapatan suami yang bekerja serabutan.

“Sekarang kalau hujan deras kami tidak was lagi tinggal di rumah, rumah kami sudah sangat layak dihuni berkat pak Apriyadi,” pungkasnya. ●RDR



“Proses penentuan penerima penghargaan sendiri dapat kami lakukan karena adanya kolaborasi dan interkoneksi data dengan berbagai kementerian dan lembaga”

Agus Gumiwang

GUNAKAN PRODUK LOKAL, APRESIASI UNTUK PEMKAB OKI

Bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan juga berupaya meningkatkan ekonomi masyarakatnya.

Salah satunya dengan lebih mengedepankan produk lokal sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut membuat Pemkab OKI meraih penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 Atas Capaian Belanja Produk Dalam Negeri di Tahun Anggaran 2023.

Penghargaan ini diberikan karena Pemkab OKI dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam belanja pemerintah daerah.

Untuk kategori pemerintah daerah, penghargaan hanya diberikan kepada 6 entitas Pemda antara lain, kategori provinsi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Lampung.

Sementara untuk kabupaten/kota diraih Kabupaten OKI, Takalar dan Kabupaten Lembata. Penghargaan diterima langsung Pj Bupati OKI, Asmar Wijaya.

“Berkat dukungan dari seluruh OPD untuk menyukseskan program P3DN. Kami terus berkomitmen meningkatkan serapan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah sehingga dapat menopang ketahanan ekonomi daerah dan nasional,” ucap Penjabat Bupati OKI, Ir. Asmar Wijaya, M. Si usai Acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2024.

Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang mengatakan Penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 merupakan bentuk apresiasi kepada dua pihak yang memiliki peran besar dalam keberhasilan Program P3DN, yakni dari sisi pengguna dan produsen produk dalam negeri.

Pada sisi pengguna, penghargaan diberikan kepada instansi pemerintah dan badan usaha yang terkena kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya Kabupaten OKI Sumsel yang dinilai banyak menggunakan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan di instansi daerah.

Sedangkan dari sisi produsen, diberikan kepada produsen dalam negeri yang tidak hanya melakukan pendalaman struktur industri, namun juga mampu memberikan produk yang berkualitas sesuai harapan konsumen.

“Proses penentuan penerima penghargaan sendiri dapat kami lakukan karena adanya kolaborasi dan interkoneksi data dengan berbagai kementerian dan lembaga,” jelas Menperin Agus Gumiwang

Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Inv-



estasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Keberhasilan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam belanja barang dan jasa pemerintah berdampak terhadap pembukaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

“Sehingga meski pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi melambat, ekonomi Indonesia dinyatakan mampu tumbuh positif sekitar 5,05 persen,” ujarnya.

Menurut Luhut, aksi afirmasi belanja produk dalam negeri selama dua tahun terakhir sudah pada jalur yang tepat.

“Untuk itu, saya sampaikan apresiasi ke seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD atas upaya meningkatkan belanja produk dalam negeri,” ujarnya.

Raih 3 Award dari Kemenkeu

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) juga dinilai baik dalam mengelola dana transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat tahun 2023.

Atas kinerja tersebut, Pemkab OKI memborong tiga kategori penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI antara lain, Realisasi DAK fisik peringkat I

se Sumsel, peringkat II Pengelolaan Dana Desa dan Peringkat III Transfer Keuangan Daerah (TKD)

Penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto kepada Pj. Sekda OKI, M. Refly pada Rakor penyerahan TKD 2024 di Palembang.

Pj. Sekda OKI, Refly mengatakan capaian tersebut merupakan komitmen jajaran Pemkab OKI untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik dalam pembangunan daerah.

“Apresiasi ini tak lepas dari kerjasama semua pihak dalam penyerapan anggaran yang optimal, serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel,” tambah Refly.

Refly menegaskan dengan capaian ini, Pemkab OKI akan terus menguatkan komitmen menjaga transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam mengelola dana publik.

“Sesuai dengan arahan Pj. Bupati bahwa kita berupaya melakukan percepatan penyerapan anggaran, karena akan berdampak terhadap laju pembangunan, pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga pelayanan kepada masyarakat,” terang dia.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto mengatakan, satker pemerintah dan Pemda dapat membantu berjalannya fungsi pemerintahan melalui penyerapan anggaran yang efisien.

“Highlight-nya bukan di penghargaan, tetapi pada tanggung jawab kita sebagai penerima penghargaan. Akuntabilitas, itu yang harus kita bangun untuk kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

Besaran pagu yang dapat direalisasikan terang dia mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang merata dan stabilitas ekonomi yang terjaga. •RDR



“Kalau mau transparan, tentu jumlahnya lebih dari yang dilaporkan. Bahkan kami yakin harta kepala daerah ini ada yang mencapai satu triliun kalau mau dicatatkan semua”

Sofhuan Yusfiansyah



TANAH DAN BANGUNAN, ASET PALING BANYAK DISIMPAN KEPALA DAERAH

Setelah pelaksanaan Pemilu 2024 usai kini fokus pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang mulai meningkat suhu politiknya. Di Sumatera Selatan, dinamika politik sangat terasa setelah secara resmi Mawardi Yahya, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumsel menyatakan maju sebagai calon Gubernur Sumsel periode 2024 - 2029.

Munculnya nama Mawardi Yahya yang berpisah dengan Herman Deru membuat persaingan semakin ketat dengan hadirnya Heri Amalindo, Bupati PALI juga ikut meramaikan Pilgub Sumsel 2024.

Untuk maju di Pilgub, butuh biaya politik yang sangat besar. Namun seberapa besar kekayaan para kepala daerah ini, menarik untuk disimak bersama.

Setelah mendeklarasikan diri untuk menjadi calon Gubernur Sumsel 2024 berpasangan dengan mantan Wali Kota Palembang, Harjojoyo, harta kekayaan Mawardi Yahya ikut menjadi sorotan.

Mawardi Yahya lahir 2 Maret 1958 dia adalah mantan Wakil Gubernur Sumsel yang menjabat sejak 1 Oktober 2018 berpasangan dengan Herman Deru. Dia juga pernah

menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir 2 periode yakni 2005-2010 dan 2010-2015.

Sebelum menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir, Mawardi yang berasal dari Partai Golkar ini merupakan Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir periode 1999-2004, saat ini dewan pembina Partai Gerindra.

Berdasarkan data dari LHKPN, harta kekayaan Mawardi Yahya yang digadag-gadang calon kuat Gubernur Sumsel tersebut mencapai Rp. 33.653.859.132. Dimana hartanya banyak tersebar di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir (OI).

Sedangkan, kandidat lain yang juga digadag-gadang maju dalam Pilgub Sumsel 2024 adalah Heri Amalindo. Bupati PALI (Penukal Abab Lematang Ilir) itu kini sedang menakar siapa yang pas untuk menjadi pasangannya. Pria kelahiran 24 September 1963 itu rutin melakukan sosialisasi ke daerah-daerah.

Harta kekayaan Heri Amalindo ber-

dasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan 3 April 2023 banyak terdiri tanah yang tersebar di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan Kota Palembang.

Selama menjabat di sebagai Bupati PALI, Heri Amalindo memiliki total kekayaan mencapai 30.578.138.247. Puluhan hektar tanah ini tersebar luas di Kabupaten Muba, sebagian kecil di Kota Palembang serta Kabupaten Banyuasin.

Sedangkan hartanya di Kabupaten PALI tidak catatan meski yang bersangkutan telah menjabat sebagai bupati selama dua periode.

Sementara Cagub Sumsel petahana, Herman Deru yang sedang menyiapkan pendamping untuk maju dalam Pilgub Sumsel 2024 pasca ditinggal Mawardi Yahya memiliki harta kekayaan berlimpah.

Ternyata harta kekayaan Herman Deru juga ikut menjadi sorotan, mengutip laman LHKPN periode 2022 yang dilaporkan pada 27 Februari 2023, Herman Deru memiliki total kekayaan Rp 149.129.100.760.

Dengan jumlah harta yang tersebar di berbagai daerah tersebut, Herman Deru menjadi kepala daerah yang memiliki harta paling banyak dibanding lainnya. Bahkan termasuk gubernur terkaya di Indonesia.

Masih Ada yang Belum Tercatat

Walaupun para kepala daerah ini telah memberikan laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui LHKPN namun diyakini masih banyak harta tersebar yang belum dilaporkan. Sehingga kekayaan yang dimiliki kepala daerah sebetulnya lebih dari yang dilaporkan ke negara.

“Kalau mau transparan, tentu jumlahnya lebih dari yang dilaporkan. Bahkan kami yakin harta kepala daerah ini ada yang mencapai satu triliun kalau mau dicatatkan semua. Untuk itu perlu keterbukaan dan jangan disembunyikan,” ungkap Sofhuan Yufiansyah selaku pembina Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS).

Dikatakan Sofhuan bukan hal mengejutkan kalau ada peningkatan tajam harta dari kepala daerah. Namun apakah harta yang banyak itu bisa memberikan manfaat ke masyarakat atau hanya ditimbun saja untuk modal melanjutkan jabatannya.

Di sisi lain, masyarakat tidak lagi jumlah hartanya karena mereka sudah tahu kalau kepala daerah di Indonesia, kaya semua.

“Sekarang kita mau melihat apa yang ditawarkan kepala daerah untuk daerahnya bukan melihat harta kekayaannya. Kalau hartanya tentu kita semua,” ujar aktivis bidang advokasi masyarakat ini.

Sofhuan juga yakin harta kekayaan ini akan terus bertambah saat mereka melanjutkan jabatannya. Namun perlu diingatkan, jangan sampai bermasalah di kemudian hari akibat terlibat kasus hukum selama menjalankan jabatannya tersebut.●RDR

Daftar kekayaan Mawardi Yahya berdasarkan LHKPN tahun periodik 2022	
Total Tanah dan Bangunan Rp 30.800.660.000	
1.	Tanah dan Bangunan seluas 4135 m2/440 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri Rp. 3.090.980.000.
2.	Tanah dan Bangunan seluas 204 m2/48 m2 di Kabupaten Ogan Ilir, hasil sendiri Rp. 150.780.000.
3.	Tanah Seluas 113900 m2 di Kabupaten Ogan Ilir, hasil sendiri, Rp. 346.700.000.
4.	Tanah dan Bangunan seluas 900 m2/1000 m2 di Kota Jakarta Utara, hasil sendiri, Rp. 25.300.000.000.
5.	Tanah dan Bangunan seluas 300 m2/150 m2 di Kabupaten Ogan Ilir, hasil sendiri Rp. 350.000.000.
6.	Tanah dan Bangunan seluas 282 m2/220 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp 500.000.000.
7.	Tanah seluas 105.200 m2 di Kabupaten Ogan Ilir, hasil sendiri Rp. 320.600.000.
8.	Tanah seluas 97.300 m2 di Kabupaten Ogan Ilir, hasil sendiri, Rp. 291.900.000.
9.	Tanah seluas 29.980 m2 di Kabupaten Ogan Ilir, hasil sendiri, Rp. 449.700.000.
Alat transportasi dan mesin Rp. 610.000.000	
1.	Mobil Land Rover minibus tahun 2007, hasil sendiri, Rp 335.000.000.
2.	Mobil Toyota tahun 2021, hadiah, Rp. 275.000.000. Harta bergerak lainnya Rp. 457.925.000, Kas dan setara kas Rp. 1.785.274.132. TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 33.653.859.132.
Harta kekayaan Heri Amalindo berdasarkan LHKPN periode April 2023	
Tanah dan bangunan Rp 7.693.839.000	
1.	Tanah dan bangunan seluas 289 m2/100 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp 433.500.000.
2.	Tanah seluas 22040 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp. 33.060.000.
4.	Tanah dan bangunan seluas 152 m2/100 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp 30.400.000.
5.	Tanah seluas 20108 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp. 30.162.000
6.	Tanah dan bangunan seluas 586 m2/50 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp. 87.900.000.
7.	Tanah dan bangunan seluas 3.998 m2/150 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp. 15.992.000.
8.	Tanah dan bangunan seluas 402.32 m2/50 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp 321.856.000.
9.	Tanah seluas 16.364 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp 49.092.000.
10.	Tanah seluas 11625 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp. 34.875.000.
11.	Tanah dan bangunan seluas 596 m2/50 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp 417.200.000.
12.	Tanah seluas 1678 m2 di Kota Palembang, 2022, hasil sendiri, Rp 167.800.000.
13.	Tanah dan bangunan seluas 402.32 m2/50 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp. 321.856.000.
14.	Tanah dan bangunan seluas 402 m2/50 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp 201.000.000.
15.	Tanah dan bangunan seluas 289 m2/100 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp. 433.500.000.
16.	Tanah dan bangunan seluas 3286 m2/150 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp. 16.430.000.
17.	Tanah dan bangunan seluas 410 m2/300 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp 2.050.000.000.
18.	Tanah dan bangunan seluas 87 m2/70 m2 di Bekasi, hasil sendiri, Rp. 435.000.000.
19.	Tanah seluas 18.504 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp 27.756.000.
20.	Tanah dan bangunan seluas 596 m2/50 m2 di Kabupaten Banyuasin, hasil sendiri, Rp 119.200.000.
21.	Tanah dan bangunan seluas 90 m2/270 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri Rp 360.000.000.
22.	Tanah seluas 19.110 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp 57.330.000.
23.	Tanah seluas 18.613 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp 36.326.000.
24.	Tanah dan bangunan seluas 500 m2/195 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp 750.000.000.
25.	Tanah seluas 594 m2 di Kabupaten Banyuasin, hasil sendiri, Rp 118.800.000.
26.	Tanah seluas 19.998 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp. 60.000.000.
27.	Tanah seluas 15.488 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp. 46.464.000.
28.	Tanah dan bangunan seluas 495 m2/135 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp 495.000.000.
29.	Bangunan seluas 90 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp. 202.500.000, 2022.
30.	Tanah dan bangunan seluas 408 m2/50 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp 142.800.000.
31.	Tanah dan bangunan seluas 586 m2/50 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp. 87.900.000.
32.	Tanah seluas 8.858 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp 26.574.000.
33.	Tanah seluas 17.033 m2 di Kabupaten Musi Banyuasin, hasil sendiri, Rp. 34.066.000.
Alat transportasi dan mesin Rp 1.113.000.000	
1.	Motor Honda, tahun 2007, hasil sendiri, Rp. 3.000.000.
2.	Mobil Daihatsu Taft Jeep tahun 2001, hasil sendiri, Rp. 40.000.000.
3.	Mobil Toyota Hardtop Jeep, tahun 1982, hasil sendiri, Rp 40.000.000.
4.	Mobil Honda CRV Jeep, tahun 2013, hasil sendiri, Rp 230.000.000.
5.	Mobil Toyota Alphard Minibus, tahun 2013, hasil sendiri, Rp 450.000.000.
6.	Mobil Honda CRV Jeep tahun 2011, hasil sendiri, Rp 200.000.000.
7.	Mobil Honda Jazz minibus, tahun 2013, hasil sendiri, Rp 150.000.000.
Harta bergerak lainnya Rp 547.000.000, Kas dan setara kas Rp 21.899.711.547., Hutang Rp. 675.412.300.	
Total harta kekayaan Rp. 30.578.138.247.	
Harta kekayaan Herman Deru berdasarkan LHKPN periode 2022 yang dilaporkan pada 27 Februari 2023:	
Tanah dan bangunan Rp. 132.552.015.000	
1.	Tanah dan bangunan seluas 7097 m2/383 m2 di Kabupaten OKU Timur, hasil sendiri, Rp 837.783.000.
2.	Tanah dan bangunan seluas 2.525 m2/608 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp 3.042.500.000.
3.	Tanah dan bangunan seluas 2.555 m2/254 m2 di Kabupaten OKU Timur, hasil sendiri, Rp 722.320.000.
4.	Tanah dan bangunan seluas 1380 m2/212 m2 di Kabupaten OKU Timur, hasil sendiri, AB Rp. 390.912.000.
5.	Tanah seluas 15.350 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri Rp 63.779.250.000
6.	Tanah Seluas 15.350 m2 di Kota Palembang, hasil sendiri, Rp 63.779.250.000
Alat transportasi dan mesin Rp. 290.000.000	
1.	Mobil Toyota Land Cruiser Jeep Tahun 1995, hasil sendiri, Rp 290.000.000.
Harta bergerak lainnya Rp 3.769.305.990 Kas dan setara kas Rp. 12.517.779.770, Sub Total Rp. 149.129.100.760, TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 149.129.100.760.	



Heri Amalindo

Herman Deru

Mawardi Yahya



“Tercatat pada tahun 2023 lalu terdapat 12 kabupaten/kota di Provinsi Sumsel meraih penghargaan Peduli HAM”

Ilham Djaya

JADI PEMIMPIN YANG PEDULI HAM

Sebagai kepala daerah hal yang paling penting adalah bagaimana memahami permasalahan dan kondisi dihadapi sehingga bisa diselesaikan tanpa meninggalkan konflik. Kemampuan ini cukup dikuasai Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan.

Atas kinerjanya itu juga Agus Fatoni meraih penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Menteri Hukum dan HAM (Kumham) Republik Indonesia (RI). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan.

Piagam tersebut diberikan atas upaya pemerintah daerah (Pemda) dalam penegakan HAM di korporasi. Tercatat pada tahun 2023 ada 12 kabupaten/kota di Sumsel yang mendapatkan penghargaan Peduli HAM.

“Kabupaten/kota tersebut adalah Pagar Alam, Palembang, Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, Pali, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur dan OKU Selatan. Sesuai ketentuan Kemenkumham karena 50 persen telah mendapatkan penghargaan peduli HAM, maka provinsi diberikan penghargaan karena telah melakukan pembinaan,” ucap Fatoni.

Fatoni menyebut saat ini isu HAM masih menjadi sorotan baik dari Non Governmental Organization (NGO) dan negara-negara maju. Dimana isu HAM bukan hanya menjadi perhatian dari pihak pemerintah melainkan pihak korporasi.

Untuk itu, guna memberikan pemenuhan HAM terhadap pelaku usaha/bisnis maka dibentuk Gugus Tugas Bisnis dan HAM Provinsi Sumsel yang dikukuhkan hari ini.

Hal ini dikarenakan kewajiban dalam memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM tak hanya menjadi milik negara melainkan juga tanggung jawab korporasi di bidang bisnis.

“Berbagai isu HAM di bidang bisnis, seperti penggunaan tenaga kerja anak (di bawah umur), hak-hak tenaga kerja wanita, gaji yang di bawah upah minimum provinsi/upah minimum kabupaten/kota serta perbudakan, masih menjadi isu sentral hingga saat ini,” ungkapnya.

Melalui pembentukan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, isu miring HAM di sektor bisnis diharapkan dapat



diminimalisir. Untuk mencapai hal tersebut perlu sinergitas antara pelaku usaha dengan pemerintah.

Fatoni menyebut permasalahan HAM merupakan permasalahan global yang muncul di setiap negara, tidak terkecuali bagi negara-negara berkembang. Sehingga semua pihak telah bersepakat untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM.

“Kami menyambut baik Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjuk sebagai focal point Nasional Bisnis dan HAM dan diharapkan dapat memberikan dukungan moral bagi semua pihak dalam menciptakan bisnis yang berbasis HAM di negara yang kita cintai ini,” ujar Fatoni.

Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM yang dikukuhkan pada hari ini akan bekerja secara maksimal untuk dapat memastikan para pelaku usaha telah memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM di lingkungan Provinsi Sumsel.

Fatoni berharap melalui tim tersebut dapat menjaga silaturahmi dan koordinasi antar lembaga instansi pemerintah, menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan kesadaran dan semangat kebersamaan untuk terwujudnya bisnis yang sehat, akomodatif, responsif, dan kooperatif baik antar sesama pelaku usaha maupun dalam penggunaan tenaga kerja serta tidak adanya diskriminatif sehingga tercipta hubungan industrial yang lebih

baik.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Sumsel ini. Harapan kami semoga momen pengukuhan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Sumsel ini dapat memperbaiki citra bisnis yang lebih baik dan membantu memberikan kontribusi serta terus bersinergi dengan Pemprov Sumsel,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ilham Djaya menyebut pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan Bisnis dan HAM di tingkat daerah, serta melaporkan aksi Bisnis dan HAM kepada Gugus Tugas Bisnis dan HAM di tingkat nasional.

“Tercatat pada tahun 2023 lalu terdapat 12 kabupaten/kota di Provinsi Sumsel meraih penghargaan Peduli HAM,” terangnya.

Gugus Tugas Bisnis dan HAM di daerah diketuai Gubernur dan keanggotaan oleh unsur instansi daerah dengan masa keanggotaan 3 tahun. Dimana tugasnya yaitu mengkoordinasikan dan menyelaraskan bisnis dan HAM.

Kemudian melakukan pemantauan strategi nasional (stranas) Bisnis HAM di tingkat daerah, dan melaporkan aksi Bisnis HAM ke tingkat nasional.

“Mudah-mudahan dengan dukungan Pj Gubernur, semua kabupaten/kota di Sumsel bisa mendapatkan penghargaan Peduli HAM,” katanya. ●RDR

"Kami selaku partai terus dorong persiapan mulai dengan susun naskah akademis, dukungan tanda tangan anggota untuk kemudian bisa masuk ke paripurna dan disahkan jadi hak angket"

Ganjar Pranowo



Pansus Hak Angket NASDEM TANTANG KESERIOUSAN PDIP

Hak angket kecurangan Pemilu 2024 di parlemen masih menjadi wacana hingga saat ini. Fraksi partai politik di DPR yang menyatakan siap mendukung hak angket masih belum juga menggulirkan hak konstitusional tersebut dengan melakukan pengajuan.

Partai Nasdem bersama partai Koalisi Perubahan pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memang sudah jelas dan menyatakan tegas untuk melakukan hak angket. Namun, rencana itu masih terkesan maju-mundur karena tidak juga segera di-realisasikan.

Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengatakan, pengajuan hak angket mesti dilakukan bersama-sama, terutama dengan PDIP. Apalagi, hak angket kecurangan pemilu diketahui memang diinisiasi Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP.

Hermawi menyebut, jika Partai Nasdem maju sendiri, atau setidaknya bersama-sama dengan partai Koalisi Perubahan, maka kekuatan hak angket nantinya kurang totalitas. Berbeda cerita jika bergabung dengan PDIP, ditambah dengan PPP. Hermawi menginginkan hak angket nanti benar-benar menang hingga akhir, tidak mentok di rapat paripurna.

"Nanti ujung semua ini kan di paripurna. Kalau sekadar mengusulkan 25 anggota dewan, dua fraksi kami bisa. Tapi kan kita enggak mau kerja setengah-setengah, mesti ada ketegasan dan komitmen," kata Hermawi di Nasdem Tower, Jumat, 8 Maret 2024.

Hermawi menekankan bahwa 'gayung mesti bersambut'. Artinya, ide dari pihak Ganjar atau PDIP seharusnya dijalankan secara bersama-sama. Sebab, hal itu merupakan kepentingan bersama untuk men-

jawab keluhan rakyat dan banyaknya dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang mencuat.

"Mari kita buktikan (kecurangan Pemilu 2024) sama-sama," tegasnya.

Hermawi menegaskan, pihaknya tinggal menunggu keseriusan dari PDIP untuk segera menggulirkan hak angket tersebut. Menurutnya, sudah banyak wacana yang terus mencuat dari niatan melanggengkan hak angket dari PDIP, sehingga kini tinggal eksekusinya saja.

"Hasto (Sekjen PDIP) bilang kan mereka bentuk tim khusus yang langsung di bawah supervisi Bu Mega. Kita tunggu itu. Kalau kemarin Aria Bima (anggota fraksi PDIP) ikut interupsi (di rapat paripurna Selasa, 5 Maret 2024), kita tunggu action teknisnya. Itu saja," tuturnya.

Hermawi menambahkan, Partai Nasdem juga menginginkan adanya perjanjian dengan PDIP mengenai langkah untuk mengajukan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Hal itu sebagai bentuk komitmen antar-partai pro hak angket untuk bersama-sama menguak dugaan kecurangan dalam pemilu yang hampir pasti dimenangkan oleh Prabowo-Gibran.

"Supaya satu suara selama angket itu

ada, untuk itu perlu semacam traktat atau perjanjian. Kalau perlu kita notariatkan, kalau perlu rakyat tahu supaya tidak ada dusta diantara kita," ujar Hermawi.

Hermawi mengatakan perlu satu visi dengan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut. Ia memastikan partai Koalisi Perubahan meliputi Partai Nasdem, PKB, dan PKS pengusung Anies-Muhaimin mendukung hak angket. Pihaknya pun menunggu keseriusan PDIP.

"Nanti kalau bertemu kami punya proposal kesepakatan-kesepakatan, satu kata dan perbuatan, jangan lain di bibir lain di hati," tuturnya.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku partai banteng telah membentuk tim khusus (timsus) untuk mengkaji usulan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket di DPR. Tim khusus tersebut disebut telah mengeluarkan rekomendasi dari hasil kajian tersebut.

Selain melakukan kajian, tim khusus tersebut juga bertugas dalam mengumpulkan temuan-temuan terkait indikasi kecurangan Pemilu 2024. Beberapa di antaranya adalah dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan intimidasi.

"Tim khusus ini sudah mengeluarkan sua-

tu rekomendasi dan kajian akademis yang kemudian disempurnakan dengan berbagai temuan-temuan," ujar Hasto di Kompleks Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis, 7 Maret 2024.

Di samping itu, ia membantah bahwa Fraksi PDIP di DPR terbelah soal usulan hak angket. Hasto menjelaskan, perumusan dan kajian terus dilakukan pihaknya sebelum mewujudkan hak angket tersebut, tetapi ia tak menyebut waktu pengusulannya.

"Dan juga berbagai opsi-opsi kan cukup banyak opsi, ada opsi sidang di MK, ada hak DPR itu sedang dikaji oleh tim khusus. Jadi banyak jalan terjal yang memang diciptakan (untuk Pemilu 2024), karena sebenarnya enggak perlu takut terhadap penggunaan hak DPR ini. Karena ketika proses pemilu ini berjalan dengan baik, ketika proses pemilu berjalan dengan jujur, sebenarnya enggak perlu takut toh penggunaan hak ini," ujar Hasto.

Sementara itu, capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo, mengakui proses pembentukan pansus hak angket untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024 tidaklah mudah. Ganjar menyadari proses tersebut bakal menemui rintangan.

Ganjar menyebut pembentukan pansus hak angket akan diwarnai pihak yang pro dan kontra. Bahkan, Ganjar menyebut pembentukan pansus itu berpotensi diujani isu tidak sedap.

"Sebuah proses panjang. Tidak akan mulus-mulus saja karena ada cerita setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita meriah agar angket bisa berjalan atau tidak berjalan," kata Ganjar, Sabtu, 9 Maret 2024.

Ganjar merasa aksi jegal dan mendukung sebuah pansus di DPR wajar terjadi. Sehingga, Ganjar dan timnya bakal memperkuat persiapan agar pansus tersebut dapat digolkan.

"Sebuah politik interplay yang terjadi. Kami sedang siapkan ini semua. Mudah-mudahan kita golongan waras yang bisa kawal ini dengan baik," ujar politikus Partai PDIP itu.

Ganjar menyebut timnya tengah menyiapkan pansus hak angket sesuai mekanisme yang ada. Salah satunya menyusun naskah akademis guna memperkuat urgensi pansus hak angket.

"Kami selaku partai terus dorong persiapan mulai dengan susun naskah akademis, dukungan tanda tangan anggota untuk kemudian bisa masuk ke paripurna dan disahkan jadi hak angket," ucap mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut. •RDO





“Artinya bila kubu Anies dan Ganjar berkoalisi di Parlemen kekuatannya adalah sebesar 51,6 persen lebih kuat dari kubu pemerintah yang hanya 45,39 persen”

Efriza

GOLKAR INCAR KURSI KETUA DPR

Perolehan suara antara Partai Golkar dengan PDIP di Pemilu 2024 tidak berbeda jauh. Setidaknya, Golkar dan PDIP akan saling berebut posisi untuk mendapatkan jatah kursi Ketua DPR.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, menyebut, penentuan kursi Ketua DPR berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

“Ketua DPR sesuai dengan ketentuan UU MD3, maka ketua DPR diduduki oleh pemilik kursi terbanyak di Parlemen,” ujar Bamsoet di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024.

Di sisi lain, santer kabar DPR akan merevisi UU MD3. Terkait hal itu, Bamsoet tidak menutup kemungkinan UU tersebut untuk direvisi. Sebab, hal itu nantinya akan berkaitan dengan perubahan kursi Ketua DPR periode 2024-2029.

“Kemungkinan (revisi UU MD3) ada, cuma kita lihat trennya. Sampai hari ini saya belum lihat lagi, apakah suara Golkar sudah melampaui PDIP,” ujarnya.

Meski begitu, Bamsoet mengingatkan soal kondusifitas politik pasca Pemilu Serentak 2024. Bamsoet pun menyatakan untuk saat ini yang perlu diprioritaskan adalah kedamaian. Bukan mementingkan kepentingan politik para elite, salah satunya soal isu revisi UU MD3.

“Jangan lah memunculkan hal-hal yang membuat kita gaduh. Saya adalah orang pertama yang tidak setuju kalau ada dorongan perubahan di UU MD3,” katanya.

Sementara itu, analis politik Citra Institute, Efriza, menilai, saat ini Partai Golkar sedang memainkan peranannya sebagai partai yang memiliki pengaruh cukup besar di kancah perpolitikan nasional. Salah satunya menggiring wacana revisi UU MD3 demi merebut kursi Ketua DPR dari PDIP.

“Partai Golkar sebelumnya mencoba melemparkan psywar terkait peluang menduduki kursi ketua DPR 2024-2029,” katanya.

Efriza menilai, berdasarkan UU MD3, partai dengan perolehan kursi terbanyak akan menjadi pimpinan di DPR. Sementara, posisi kedua dan seterusnya akan menduduki kursi Wakil Ketua DPR. Misalnya, dilihat dari perolehan suara pemilihan legislatif (Pileg) 2024, perolehan suara PDIP masih yang tertinggi. Secara otomatis, DPR

nantinya akan dipimpin oleh kader partai banteng. Perolehan suara PDIP memang berbeda sangat tipis dengan Partai Golkar. Terakhir dalam pantauan Info Indonesia, PDIP meraih 16,39 persen suara, sedangkan Partai Golkar meraih 15,05 persen. Selisih perolehan suara antara PDIP dan Partai Golkar sekitar 1,34 persen.

“Meski begitu, peringkat pertama tetap masih dipegang oleh PDIP,” katanya.

Kata Efriza, yang perlu diperhatikan adalah siasat Partai Golkar untuk merebut kursi Ketua DPR. Menurutnya, Partai Golkar masih memiliki peluang untuk merebut kursi Ketua DPR dari PDIP. “Hal yang menarik adalah langkah Golkar menggeser PDIP dari kursi Ketua DPR memungkinkan terjadi,” katanya.

Namun, Efriza memprediksi, Partai Gerindra tidak akan menyetujui adanya revisi UU MD3. Partai Gerindra, lanjut Efriza, akan tetap konsisten agar DPR tetap menggunakan UU MD3 dalam menentukan kursi ketua. “Mereka ingin konsisten menjalankan apa yang ada dalam rumusan UU MD3 saat ini,” ujarnya.

Efriza menyampaikan, partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) tentunya akan mendapatkan penolakan dari partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam merevisi UU MD3. Apalagi, revisi UU MD3 itu hanya untuk mengkomodir kepentingan partai politik pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, kubu Ganjar-Mahfud telah lebih intens bersama kubu Anies-Muhaimin di mana kekuatan suara dari tiga partai mencapai 29,04 persen, yaitu Nasdem 10,26 persen, PKB 10,09 persen, dan PKS 8,70 persen.

“Artinya bila kubu Anies dan Ganjar berkoalisi di Parlemen kekuatannya adalah sebesar 51,6 persen lebih kuat dari

kubu pemerintah yang hanya 45,39 persen,” paparnya.

Ini artinya, lanjut Efriza, jika ingin menyelesaikan revisi UU MD3, maka KIM harus menggoda barisan partai-partai lain dari dua koalisi yang ada. “Nah yang memungkinkan kembali seperti 2014 adalah PPP, sebab PPP saat itu juga lebih memilih kepada kubu pemerintah, sehingga mereka bisa dapat kompensasi kursi dari Presiden Jokowi kala itu,” katanya.

Efriza menilai, dasar untuk revisi UU MD3 ini untuk partai politik pendukung Prabowo-Gibran dapat menguasai parlemen maupun pemerintahan.

“Apa latar belakangnya? Tentu saja sama menguasai pemerintahan. Motivasi dari penguatan kekuatan kubu pemerintah agar kebijakan dan keputusannya lebih mudah diproses di DPR, memungkinkan menjadi

bayangan akan penilaian positif dan rencana masuk akal ini bisa menggoda partai-partai lain,” terangnya.

Maka dari itu, jika Partai Golkar ingin merebut kursi Ketua DPR, mau tidak mau harus melakukan lobi politik kepada partai pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Sehingga, kekuatan partai politik pendukung revisi UU MD3 semakin kuat dan dapat mengalahkan partai politik yang bertentangan.

“Tetapi, memulainya tentu saja harus menggoda salah satu partai dari kubu oposisi yang saat ini besar, agar kekuatan oposisi menjadi lemah, syarat menggodanya adalah bagi-bagi kursi di kabinet, maupun di posisi alat kelengkapan dewan (AKD),” jelasnya.

Efriza mengatakan, untuk mewujudkan revisi UU MD3, Partai Golkar harus membujuk dengan narasi agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat stabil. Selain itu, juga dapat mendegradasi PDIP. Sehingga, PDIP tidak dapat melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran kelak memimpin Indonesia periode 2024-2029. Selain itu, pemerintahan Prabowo-Gibran harus menyisakan jatah kursi menteri bagi partai politik pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk mendapatkan dukungan. Terlebih nantinya partai pendukung pemerintah akan semakin kuat.

“Karena jika tanpa revisi UU MD3 memungkinkan PDIP sebagai oposisi akan merecoki pemerintahan. Syarat merealisasikan merevisi UU MD3 tersebut adalah bagi-bagi kursi di kabinet dan kemungkinan juga untuk jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan nantinya,” tandasnya. ●RDO



“Selama ini karakteristik Partai Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang menjadi bagian dari pemerintahan, tentunya linear dengan Gibran sebagai Wakil presiden sekaligus ketua umum Partai Golkar”

M Qodari



JOKOWI ATAU GIBRAN KETUA UMUM PARTAI GOLKAR

Calon wakil presiden nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, disebut-sebut berpotensi menjadi kandidat Ketua Umum Partai Golkar.

Wacana Gibran di pucuk Partai Beringin itu pertama kali muncul dari pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari.

Qodari mengatakan, putra sulung Presiden Joko Widodo itu berpeluang jadi ketua umum Partai Golkar untuk menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, yang menyebut empat nama potensial sebagai ketua umum partai beringin.

“Sebagai partai besar, tentu Golkar partai yang sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan. Karena itu dikaitkan dengan Pak Jokowi sebagai calon potensial untuk menjadi ketua umum Golkar ke depan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 12 Maret 2024.

Sebelumnya, Bamsot mengatakan empat nama masuk bursa bakal calon ketua umum Golkar menjelang musyawarah nasional pada Desember 2024. Mereka adalah Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan dia sendiri.

“Setidaknya sudah empat (nama) santer suara yang muncul di permukaan akan bertarung di forum munas tahun ini. Ada Pak Airlangga, kemudian Pak Agus Gumiwang, ada Pak Bahlil, dan ada saya,” kata Bamsot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024.

Di luar empat nama yang disebutkan Bamsot, Qodari mengatakan, ada satu calon yang juga sangat potensial untuk menjadi Ketum Golkar ke depan, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Qodari menjelaskan dua alasan Gibran layak memimpin Golkar.

Pertama, kata dia, Gibran tidak lama lagi menduduki jabatan posisi strategis sebagai orang nomor dua di Indonesia, pada saat dilantik menjadi wakil presiden secara resmi pada Oktober 2024. Menurut dia, selama ini karakteristik Partai Golkar memiliki kecenderungan sebagai partai yang menjadi bagian dari pemerintahan, tentunya linear dengan Gibran sebagai Wakil presiden sekaligus ketua umum Partai Golkar.

“Partai Golkar punya kecenderungan yang sangat kuat untuk memiliki kaki, memiliki akses di pemerintahan, bukan hanya menteri tetapi juga atau bahkan wakil presiden, karena Golkar adalah partai yang ideologinya karya dan kekaryaannya dan selalu berorientasi untuk menjadi bagian dari pemerintahan,” ujar Qodari.

Qodari melihat pengalaman itu terjadi pada wakil presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla saat menjabat pertama kali pada periode 2004-2009. Pada saat yang sama, JK juga berhasil menjadi ketua umum Golkar.

Alasan kedua, kata Qodari, Golkar ke depan harus berorientasi anak muda karena pemilih terbanyak berasal dari kalangan muda. Karena itu, tantangannya Golkar juga harus diisi oleh banyak anak muda.

“Partai Golkar ini adalah partai yang tua, partai besar, dan kalau kita bicara mengenai pemilih pada hari ini dan pemilih di masa yang akan datang, saya kira Partai Golkar mengalami tantangan bagaimana agar partai ini bisa menjadi partai yang punya orientasi kepada anak muda dan punya tokoh yang juga berasal dari anak muda,” katanya.

Dia mengatakan akan sangat menarik jika Golkar memiliki tradisi baru, yaitu dipimpin oleh anak muda dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka, bukan lagi politikus senior. Dengan dipimpin anak muda, Qodari menilai peluang partai Golkar secara elektoral naik signifikan di masa depan akan terbuka lebar, melihat pengalaman Pilpres 2024 di mana pasangan Prabowo-Gibran juga begitu dominan di kalangan muda.

Menanggapi isu tersebut, Gibran sendiri mengaku enggan dicalonkan menjadi Ketua Umum partai berlam-bang pohon beringin itu. Menurut Wali Kota Surakarta itu, banyak kader partai Golkar yang lebih layak menduduki jabatan tersebut.

“Wah, enggak lah. Biar yang senior-senior atau yang lebih berpengalaman saja,” katanya di Balai Kota Solo, Rabu, 13 Maret 2024.

Namun Gibran tak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah ia menolak menjadi Ketua Umum Partai Golkar dengan pernyataannya tersebut. Ia hanya mengulangi jawaban awalnya.

“Wah saya kan enggak tahu prosesnya di dalam Partai Golkar seperti apa untuk pemilihan ketua umum. Yang jelas ya kembali ke itu tadi. Masih banyak yang senior-senior, masih banyak yang berpengalaman,” katanya.

Di samping itu, Gibran beralasan saat ini dirinya masih menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Solo. Dalam berbagai kesempatan, Gibran mengatakan masih banyak

pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum masa jabatannya berakhir akhir 2024 nanti.

“Dan sekali lagi untuk saat ini kami masih fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo,” katanya.

Lebih lanjut, Gibran mengaku hubungan dengan semua ketua umum partai pendukung Paslon 02 masih terjalin dengan baik, termasuk dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto.

“Ya pasti terjalin terus. Dengan Pak Airlangga, dengan siapapun, dengan partai manapun juga,” katanya.

Selain itu, Gibran mengaku tidak ada rencana bergabung dengan salah satu partai koalisi. Pembicaraan dengan para petinggi partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) pun tidak pernah menyinggung hal tersebut. “Belum ada (ajakan dari partai). Belum ada pembicaraan ke sana juga,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gol-

kar, Dave Laksono, mengatakan pihaknya belum mendengar wacana Gibran menjadi ketum Golkar. “Wah, belum dengar saya mengenai hal tersebut,” ujar Dave, Rabu, 13 Maret 2024.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sudah lama diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar karena beberapa manuver yang dilakukannya membuat PDIP tidak senang. Belakangan, muncul kembali isu bahwa mantan Wali Kota Solo itu bakal menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Jokowi secara formal masih merupakan kader PDIP. Namun, realita politik pada Pilpres 2024 menunjukan kedua belah pihak sudah beda kepentingan. Terlebih, pasca majunya anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Lantas, bola liar isu Jokowi merapat ke Golkar mulai bergulir.

Isu mengenai Jokowi yang akan merapat ke Golkar muncul saat ia memberikan gestur tak biasa dengan memakai dasi kuning saat hendak bertolak ke Jepang dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023.

Golkar kemudian membaca hal tersebut sebagai sinyal politik presiden yang nyaman dan akan merapat pada pihaknya. Ketika ada pertanyaan perihal makna dasi tersebut di Bogor pada Selasa, 19 Desember 2023, Jokowi menjawab, nyaman.

Tak lama kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto gamblang menyatakan Jokowi dengan partainya memiliki hubungan yang sangat dalam.

“Jadi, hubungan (keluarga besar Jokowi) dengan Partai Golkar memang sudah sangat sangat dalam,” kata Airlangga saat menghadiri senam massal rangkaian HUT Golkar ke-59 di Yogyakarta pada Minggu, 24 Desember 2023.

Mesranya hubungan Jokowi dan Golkar sebagai anak kandung Orba sebenarnya sudah tercium lama. Pengamat Yudi Latief menulis dalam sebuah artikel di media nasional, bahwa Jokowi lebih nyaman dengan merapat pada binaan Orba.

●RDO

